



JURNAL ADMINISTRASI NEGARA

Volume 2 – Nomor 1 – Agustus 2017

ISSN 2086-1338

Almira Devita Putri, Entang AM, Candradewini
(Penempatan Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung)

Andini Hening Safitri, Ida Widianingsih, Mas Halimah
(Koordinasi dalam Penanganan Gelandangan Pikotik di Kota Bandung)

Deviana Fadhlya, Yogi Suprayogi, Imanudin Imanudin
(Kualitas Pelayanan Perpustakaan di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat)

Kurnia Muhamad Ramdhan, Asep Sumaryana, Slamet Usman Ismanto
(Pemantauan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Garut Kota Oleh Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Garut)

Nina Marlina, Heru Nurasa, Ramadhan Pancasilawan
(Efektivitas Program Pengembangan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Ciamis (Studi pada Objek Wisata Situ Lengkong))

Ningrum Fauziah Yusuf, Herijanto Bakti, Dedi Sukarno
(Implementasi Program Sertifikasi Guru dalam Jabatan (Studi pada Madrasah Aliyah Negeri Ciparay Kabupaten Bandung))

Rizki Nugraha, Budiman Rusli, MD. Enjat Munajat
(Responsiveness Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Limbah Industri pada Lahan Pertanian di Kawasan Rancaekek)

<http://jurnal.unpad.ac.id/jane/>

JURNAL ADMINISTRASI NEGARA

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran
Bandung, Indonesia

JANE - JURNAL ADMINISTRASI NEGARA

Volume 2 – Nomor 1 – Agustus 2017

SUSUNAN PANITIA JURNAL

Penanggung Jawab	: Kepala Departemen Administrasi Publik FISIP UNPAD Ketua Prodi Administrasi Publik FISIP UNPAD
Pimpinan Redaksi	: MD. Enjat Munajat
Anggota Redaksi	: Dedi Sukarno Imanudin Kudus Candradewini Rd. Ahmad Buchari
Reviewer	: Budiman Rusli Entang A. Muchtar Asep Sumaryana Sawitri B. Utami Ramadhan Pancasilawan
Tata Usaha	: Hadi Sumarna Tita Rosita Siti Rahayu
Editing dan Lay Out	: Hikmat Sudrajat

ALAMAT REDAKSI

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran
Jl. Raya Bandung-Sumedang Km. 21 Jatinangor
Telp. 022-7796626
Email: jurnalane@unpad.ac.id

JURNAL ADMINISTRASI NEGARA

Volume 2 – Nomor 1 – Agustus 2017



**Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran
Bandung, Indonesia**

<http://jurnal.unpad.ac.id/jane/>

PENGANTAR

Pada Edisi ini, Jurnal Administrasi Negara banyak memaparkan variasi dari berbagai macam tema tulisan, di antaranya tentang tema besar sumberdaya manusia para aparat sipil Negara yang memang hingga kini dirasa masih belum mencapai taraf efektif dan efisien dari segi kinerjanya. Di samping itu, kami melihat beberapa tema yang terkait wilayah Bandung dan sekitarnya selalu menjadi tema menarik untuk dibahas. Di antaranya adalah kualitas pelayanan perpustakaan dan kearsipan daerah, serta implementasi kebijakan penataan kaki lima. Selain itu, sertifikasi guru-pun masih menjadi isu yang menarik untuk dibahas di sini di samping isu pencemaran dan limbah industri yang sulit untuk menemukan solusinya.

Selain di wilayah Bandung dan sekitarnya, bergeser ke wilayah Kabupaten Garut di mana isu yang diangkat adalah tentang penanganan gelandangan di Kabupaten Garut, dan demikian pula tetangganya yaitu Kabupaten Ciamis-pun memiliki topik bahasan yang menarik untuk dibahas yaitu tentang destinasi wisata di Kabupaten Ciamis.

Akhir kata, kami mengucapkan selamat membaca tulisan edisi ini. Terima kasih.

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PENEMPATAN PEGAWAI DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG <i>Almira Devita Putri, Entang AM, Candradewini</i>	1
KOORDINASI DALAM PENANGANAN GELANDANGAN PIKOTIK DI KOTA BANDUNG <i>Andini Hening Safitri, Ida Widianingsih, Mas Halimah</i>	10
KUALITAS PELAYANAN PERPUSTAKAAN DI BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT <i>Deviana Fadhlly, Yogi Suprayogi, Imanudin Imanudin</i>	21
PEMANTAUAN KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN GARUT KOTA OLEH TIM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA KABUPATEN GARUT <i>Kurnia Muhamad Ramdhan, Asep Sumaryana, Slamet Usman Ismanto</i>	28
EFEKTIVITAS PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA DI KABUPATEN CIAMIS (STUDI PADA OBJEK WISATA SITU LENGKONG) <i>Nina Marlina, Heru Nurasa, Ramadhan Pancasilawan</i>	37
IMPLEMENTASI PROGRAM SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN (STUDI PADA MADRASAH ALIYAH NEGERI CIPARAY KABUPATEN BANDUNG) <i>Ningrum Fauziah Yusuf, Herijanto Bakti, Dedi Sukarno</i>	43
RESPONSIVENESS PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI PADA LAHAN PERTANIAN DI KAWASAN RANCAEKEK <i>Rizki Nugraha, Budiman Rusli, MD. Enjat Munajat</i>	51

**PENEMPATAN PEGAWAI DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG**

***THE OFFICER PLACEMENT AT BANDAR LAMPUNG REGIONAL STAFF
DEPARTMENT***

Almira Devita Putri; Entang AM; Candradewini;
almiravita55@gmail.com; entang@unpad.ac.id; candradewini@unpad.ac.id
Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran
Bandung, Indonesia

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian mengenai Penempatan Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa indikasi masalah dalam penempatan pegawai yang belum sesuai seperti latar belakang pendidikan dan hingga kini pelaksanaannya lebih mengutamakan untuk mengisi kekurangan daripada memenuhi kualitas sesuai dengan yang dibutuhkan.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penempatan pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung. Penelitian ini mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Tohardi (2002) mengenai dasar-dasar dalam penempatan yang terdiri dari *Job Specification*, *Job Description*, Kemampuan dan Kebutuhan. Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan menggunakan metode kualitatif.

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa terdapat dasar penempatan yang belum dipertimbangkan dengan baik yaitu *Job Specification* berupa belum ditetapkannya kualifikasi yang harus dipenuhi oleh pegawai secara merata, belum dipertimbangkannya *Job Description*, dan analisis kebutuhan pegawai yang belum sepenuhnya dipertimbangkan dalam penempatan pegawai. Adapun dasar penempatan yang telah dipertimbangkan dengan baik adalah kemampuan yang dimiliki seorang pegawai.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penempatan pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung belum terlaksana dengan tepat. Saran dari penulis untuk penempatan pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung adalah kepada pelaksana untuk membuat aturan pokok mengenai kualifikasi yang harus dipenuhi oleh pegawai dan menggunakan hasil analisis jabatan untuk memenuhi kualitas pegawai yang sesuai dengan kebutuhan.

Kata Kunci: Penempatan Pegawai, Pelayanan Publik, *Job Description*, *Job Specification*

ABSTRACT

This thesis is the result of research on the Officer Placement at Bandar Lampung Regional Staff Department. The background of this research is based on some indications of problems appears in officers placement which are not suitable with their educational background and up to now the implementation prefers to fill the lack rather than meets the quality accordance with the required.

The purpose of this research is to know how the placement of employees in Bandar Lampung Regional Staff Department. This research refers to theory explained by Tohardi (2002) about the basics in placement which consist of Job Specification, Job Description, Capabilities and Needs. This research uses qualitative research method.

From the results of the research and discussion conducted by the writer, it is indicate that there is a basic placement which have not been adequately considered yet, including Job Specification such as not determined yet the qualifications that must be met by employees as equally, the unconsidered Job Description, and officers' needs analysis which have not been fully used in the placement of the officers. The placement basis which has been considered well is the ability of an officer.

The conclusion of this research show that the employee placement in Bandar Lampung Regional Staff Department not completely worked precisely. The advices from writer about the placement of officers in Bandar Lampung Regional Staff Department are to implementers to make main regulation about the regarding to the qualifications should be met by the officers and using the results of job analysis to meets the quality of employees accordance with the needs.

Keywords: *Officer Placement, Public Services, Job Specification, Job Description*

PENDAHULUAN

Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh perubahan pola pikir masyarakat ke arah yang semakin kritis. Hal itu dimungkinkan, karena semakin hari warga masyarakat semakin cerdas dan semakin memahami hak dan kewajibannya sebagai warga. Kondisi masyarakat yang demikian menuntut hadirnya pemerintah yang mampu memenuhi berbagai tuntutan kebutuhan dalam segala aspek kehidupan mereka, terutama dalam mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya dari pemerintah.

Peran Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, hasil utama yang diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintah adalah pelayanan publik yang baik, sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kondisi penyelenggaraan pelayanan publik sampai dengan saat ini masih belum sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga pemerintah wajib untuk: (a) mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak; (b) menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (c)

memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Banyaknya organisasi penyelenggara pelayanan publik di Indonesia baik di pusat atau daerah memiliki beragam kebutuhan pelayanan yang berbeda antar satuan kerja. Hal ini terlihat dari perbedaan hasil pelayanan yang diberikan berupa pelayanan atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif. Bagi pelayanan yang memang secara langsung harus diberikan kepada masyarakat adalah seperti pelayanan di kantor imigrasi, kantor dinas kependudukan dan catatan sipil, kantor pajak, dan lain sebagainya. Namun, pelayanan tidak hanya ditujukan bagi masyarakat umum, pelayanan juga dibutuhkan oleh PNS sebagai pendukung pelaksanaan pekerjaan. PNS membutuhkan pelayanan administrasi kepegawaian untuk menunjang pekerjaan. Adapun organisasi publik yang menyelenggarakan pelayanan ini salah satunya adalah Badan Kepegawaian Daerah. Salah satu Badan Kepegawaian Daerah yang menarik penelitian penulis untuk diteliti adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung atau yang selanjutnya disingkat BKD Kota Bandar Lampung.

Guna merealisasikan tujuan pelayanan publik ini, tidak dapat terlepas dari diperlukannya pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS sebagai pelaksana pelayanan publik di bidang

administrasi kepegawaian. PNS disertai tugas sebagai pelaksana yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Dalam melaksanakan tugas, BKD Kota Bandar Lampung memerlukan PNS yang dapat berkinerja optimal untuk menghasilkan kualitas pelayanan yang prima. Namun, keadaan PNS di daerah mengalami perkembangan seiring dengan berjalannya waktu. PNS di daerah mengalami berbagai persoalan dalam pelaksanaan tugas dan hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah manajemen kepegawaian atau yang disebut juga manajemen aparatur sipil negara yang belum dilaksanakan secara optimal.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis di BKD Kota Bandar Lampung, pelayanan yang diberikan oleh pelaksana belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Hal ini terlihat dari adanya pelayanan administrasi kepegawaian yang belum dapat terselesaikan secara tepat waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana standar operasional pelayanan (SOP). Salah satu jenis pelayanan yang belum dapat terlaksana sesuai dengan rencana SOP adalah penyelesaian cuti PNS. Waktu penyelesaian yang ditetapkan adalah kurang lebih tiga hari, namun pada pelaksanaannya waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaiannya adalah satu bulan. Pada kenyataannya, berdasarkan observasi dan wawancara awal yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian kemampuan PNS atau pelaksana terhadap pekerjaan yang dilakukannya.

Dalam hal diatas, untuk memperoleh PNS yang diharapkan maka BKD Kota Bandar Lampung harus melaksanakan manajemen kepegawaian secara tepat dan objektif salah satunya adalah penempatan pegawai yang diharapkan dapat memperoleh kesesuaian antara pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki pegawai tersebut dengan syarat yang dibutuhkan oleh suatu jabatan. BKD

Kota Bandar Lampung merupakan satuan kerja perangkat daerah yang berwenang melaksanakan penempatan pegawai baik penempatan pegawai secara internal maupun melaksanakan penempatan pegawai di seluruh SKPD lingkungan pemerintah kota Bandar Lampung. Namun setelah melakukan observasi dan wawancara awal di BKD Kota Bandar Lampung, penulis menemukan adanya permasalahan dalam penempatan pegawai dalam kurun waktu tahun 2011-2015 dimana terdapat ketidaksesuaian antara syarat jabatan berupa pendidikan formal dengan jabatan yang ditempati oleh seorang pegawai.

**Tabel 1.1 Penempatan Pegawai di BKD Kota Bandar Lampung
Tahun 2011-2015**

No.	Nama	Tahun Penempatan	Pendidikan	Syarat Jabatan	Jabatan
1.	Nia Ficandari	2012	SMA	S1	Pengumpul Data Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional
2.	Eka Jaya Saputra, S.H.	2011	S1 (Hukum)	S1 (Komputer)	Pengumpul/Penyiap Data Kesejahteraan, Data dan Informasi Kepegawaian
3.	Mohammad, Ardhiyansyah S.Ag.	2012	S1 (Agama Islam)	S1	Pengumpul/Pengolah Data pembinaan dan pemberhentian pegawai
4.	Maharani Tirta Sari, S.STP.	2014	IPDN	S1 (Ilmu Pemerintahan)	Pemroses Data Pengembangan Pegawai
5.	Yan Abdillah, S.Kom.	2011	S1 (Komunikasi)	S1 (Semua Jurusan)	Pemroses Data Pengadaan Pegawai

(Sumber: Laporan Akhir Penyusunan Analisis Jabatan di BKD Kota Bandar Lampung Tahun 2014)

Selain itu, berdasarkan observasi awal yang penulis temui juga di lapangan. Sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang, BKD Kota Bandar Lampung mengalami kekurangan pegawai dan hal ini berdampak pada penempatan pegawai yang telah terlaksana. Menurut wawancara awal penulis kepada Sekretaris BKD Kota Bandar Lampung, beliau mengatakan bahwa penempatan yang dilaksanakan lima tahun terakhir ini lebih mengutamakan untuk mengisi kekosongan jabatan. Oleh karena itu dalam penelitian ini ditujukan untuk mencari tahu bagaimana penempatan pegawai di BKD Kota Bandar Lampung. Adapun menurut Tohardi (2002) penempatan pegawai di BKD Kota Bandar Lampung harus memperhatikan *job specification*, *job description*, kemampuan, dan kebutuhan pegawai.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian

kualitatif. Melalui metode ini, penulis bermaksud untuk mengeksplorasi dan berusaha menjelaskan secara mendalam bagaimana penempatan pegawai di BKD Kota Bandar Lampung untuk kemudian diproses, dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan teori yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga diperoleh gambaran mengenai penempatan pegawai BKD Kota Bandar Lampung untuk kemudian ditarik kesimpulan.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). yang meliputi observasi dan wawancara. Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan teknik *purposive* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penempatan pegawai di BKD Kota Bandar Lampung sudah berjalan sesuai dengan prosedur, baik untuk penempatan pegawai baru maupun pegawai lama. Pada praktiknya, penempatan pegawai di BKD Kota Bandar Lampung belum sepenuhnya mempertimbangkan dasar-dasar penempatan menurut Tohardi (2002).

Berdasarkan dasar spesifikasi pekerjaan, BKD Kota Bandar Lampung memiliki dua spesifikasi yang harus dipenuhi pegawai untuk dapat ditempatkan pada suatu pekerjaan yaitu spesifikasi latar belakang pendidikan dan spesifikasi pengalaman. Pada praktiknya, spesifikasi tersebut telah diatur dan hanya berlaku bagi pegawai struktural. Sebaliknya, selama ini pegawai non struktural hanya ditempatkan berdasarkan kebutuhan akan pekerjaannya saja. Ketiadaan aturan pokok yang mencantumkan spesifikasi latar belakang pendidikan dan pengalaman sebagai dasar dalam penempatan pegawai non struktural membuat pelaksanaannya hanya dipandang sebagai bentuk formalitas.

Kemudian dasar *job description*, BKD Kota Bandar Lampung telah memiliki uraian pekerjaan yang merupakan hasil turunan dari Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2006. Mengenai praktiknya, BKD Kota Bandar Lampung belum menunjukkan penggunaan uraian pekerjaan sebagai salah satu dasar untuk melihat karakter pegawai yang cocok dalam mengerjakan jenis pekerjaan, baik penempatan pegawai baru maupun pegawai lama. Uraian pekerjaan baru dirasakan sebagai suatu hal yang penting, namun dalam pelaksanaannya masih perlu dipertimbangkan kembali.

Kemudian dasar pertimbangan ketiga yaitu kemampuan, BKD Kota Bandar Lampung telah mempertimbangkan aspek ini dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya pegawai lama yang mengikuti tes

terlebih dahulu sebelum ditempatkan pada suatu pekerjaan. Begitu juga dengan pegawai baru, dimana CPNS telah mengikuti tes kemampuan bakat dan tes kemampuan dasar. Se jauh ini, kemampuan pegawai disesuaikan kembali dengan kebutuhan pekerjaannya dan dianggap dapat dimiliki sebelum atau setelah pegawai tersebut ditempatkan pada suatu pekerjaan.

Kemudian dasar pertimbangan keempat yaitu kebutuhan. BKD Kota Bandar Lampung telah memprioritaskan kebutuhan akan kuantitas pegawai dibandingkan dengan kebutuhan akan kualitas pegawai. Hal ini disebabkan urgensi berupa kebutuhan satker yang mengalami kekurangan pegawai lebih diutamakan sehingga kualitasnya terkesampingkan. Namun, pada praktiknya masih saja terdapat pegawai yang mengalami kelebihan beban kerja, sehingga kebutuhan yang harus dipenuhi oleh BKD Kota Bandar Lampung belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Berdasarkan hasil yang ditunjukkan di lapangan menunjukkan bahwa prinsip *the right man in the right place* belum berjalan dengan baik.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan penempatan pegawai di BKD Kota Bandar Lampung dapat dikatakan belum sepenuhnya didasarkan pada keempat dasar yang dijadikan bahan pertimbangan. Pada dasar pertimbangan pertama, diketahui bahwa spesifikasi tidak selalu dipertimbangkan kepada pegawai yang akan ditempatkan dikarenakan tidak adanya aturan pokok yang mengatur mengenai kualifikasi yang harus dipenuhi pegawai untuk ditempatkan pada suatu pekerjaan. Dasar pertimbangan kedua, Uraian pekerjaan baru dirasakan sebagai suatu hal yang penting, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hal lain yang perlu dipertimbangkan kembali.

Dasar pertimbangan ketiga, BKD Kota Bandar Lampung telah menjadikan kemampuan sebagai salah satu dasar dalam penempatan pegawai. Terakhir, penempatan pegawai di BKD Kota Bandar Lampung harus disesuaikan dengan kebutuhan. Kebutuhan yang telah menjadi prioritas utama adalah kebutuhan akan kuantitas pegawai. Namun, pelaksanaannya masih menunjukkan adanya pegawai yang mengalami kelebihan beban kerja dan menyebabkan rangkap tugas.

Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti mencoba memeberikan beberapa saran atau masukan sebagai bahan pertimbangan bagi pelaksana, yaitu:

1. Diharapkan BKD Kota Bandar Lampung dapat membuat aturan pokok mengenai syarat atau kualifikasi yang harus dipenuhi oleh pegawai untuk ditempatkan di suatu jabatan. Ketiadaan aturan ini membuat penempatan yang dialami antara satu pegawai dengan pegawai lainnya menunjukkan perbedaan dalam proses penyesuaian kualifikasi.
2. Sebaiknya BKD Kota Bandar Lampung dapat menggunakan uraian pekerjaan yang dihasilkan dari proses analisis jabatan. Hal ini bertujuan agar penempatan dapat sesuai dengan kompetensi dan keahlian pegawai yang bersangkutan dengan jabatan yang didudukinya.
3. Sebaiknya Kepala BKD Kota Bandar Lampung melakukan sosialisasi mengenai *merryt system* kepada setiap pegawai. Dengan adanya sosialisasi diharapkan BKD Kota Bandar Lampung sebagai ujung tombak pelaksana kebijakan di bidang kepegawaian memahami dan melaksanakan amanat Undang-Undang ASN No 5 Tahun 2014 mengenai manajemen PNS

berdasarkan sistem merit, salah satunya dalam penempatan pegawai.

4. Sebaiknya BKD Kota Bandar Lampung mampu melaksanakan penempatan pegawai dengan menyeimbangkan antara kebutuhan akan kualitas maupun kebutuhan akan kuantitas pegawai. Tidak mengenyampingkan kualitas dikarenakan prinsip dari penempatan pegawai adalah "*The Right Man in The Right Place*".
5. Diharapkan BKD Kota Bandar Lampung mendistribusikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan mengacu pada kebutuhan organisasi yang sebenarnya dalam arti sesuai dengan beban kerja yang ada, sehingga PNS mengerti, tau dan mampu tentang pekerjaannya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis tidak akan mampu mengerjakan skripsi ini tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata, S.I.P., S.Si., M.T., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Bapak Dr. Santoso Tri Raharjo, S.Sos., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Bapak Mohammad Benny Alexandri, S.E., M.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Bapak Dr. Drs. H. Entang Adhi Muhtar, M.S. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran sekaligus Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, nasihat, motivasi serta waktu luang yang telah diberikan kepada penulis. Semoga kebaikan Bapak digantikan dengan kesehatan dan kebahagiaan oleh ALLAH SWT, Bapak Ramadhan Pancasilawan, S.Sos., M.Si. selaku selaku Sekretaris

Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Penghargaan dan penghormatan kepada Ibu Dr. Candradewini, S.I.P., M.Si., selaku co-pembimbing sekaligus Dosen Wali penulis yang telah memberikan ilmu, pengarahan, dan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih telah membimbing penulis selama penulis menjadi mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran. Semoga kebaikan Ibu digantikan dengan kesehatan, kebahagiaan, dan dipermudah dalam segala urusan oleh Allah SWT. Ibu Nunung Runiawati, S.I.P., M.Si. dan Bapak Dedi Sukarno, S.I.P., M.Si., selaku dosen pembahas pada Seminar Usulan Penelitian penulis. Terima kasih atas saran dan masukan yang sangat membangun dan membantu penulis untuk menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik. Semoga Ibu dan Bapak senantiasa mendapat rahmat dari Allah SWT. Ibu Tina dan Teh Mira selaku staf Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran yang selalu membantu penulis dalam hal administrasi akademik. Terimakasih atas kebaikan yang telah diberikan. Seluruh staf Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran yang telah membantu penulis dalam hal akademik. Selain itu, penulis ucapkan terimakasih kepada seluruh informan dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung yaitu Bapak Dr. Muhammad Umar selaku Kepala BKD Kota Bandar Lampung, Ibu Siti Supiah S.H., M.H., selaku Sekretaris, Bapak Muzanni Ali, Bapak Ronald Putra Nugraha, dan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung yaitu Bapak Drs. Barizi M.Si. yang terlibat dalam memberikan informasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih atas dukungan, bantuan serta informasi yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas kesediaan waktu serta pemberian data yang penulis butuhkan terkait dengan penelitian ini. Dan terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Armstrong, Michael. 2006. *A Handbook of Human Resource Management Practice 10th Edition*. Great Britain: Cambridge University Press
- Creswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Terjemahan Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dessler, G. (2008). *Human Resource Management 11th Edition*, New Jersey: Pearson Education
- Handayaniingrat, Sowarno. 1992. *Administrasi Pemerintah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gunung Agung
- Hasibuan, Malayu S.P. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kettner. 2002. *Analisis Achieving Excellence in the Management of Human Service Organizations*. Boston: Allyn & Bacon
- Mamoria, C, B. 1989. *Personnel Management*. Himalaya: Himalaya publishing
- Marwansyah. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Kedua*. Bandung: Alfabeta

- Mathis, Robert L. John H. Jackson. 2010. *Human Resources Management Thirteen Edition*. USA: South Western Cengage Learning
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Ndraha, Taliziduhu, 1999. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Renika Cipta
- Rivai, Veithzal dan Ella Jauvani Sagala. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Edisi Ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sedarmayanti. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika
- Sedarmayanti. 2011. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: Refika
- Siagian, Sondang P. 1992. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Siswanto, Badjo. 2005. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. *Administrasi Publik; Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Susilo, Willy. 2002. *Audit SDM – Panduan Komperhensif bagi Auditor, praktisi Manajemen SDM serta pimpinan organisasi dan perusahaan*. Jakarta: PT Vorqistatama Binamega
- Tohardi, Ahmad. 2002. *Pemahaman Praktis Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan 1. Bandung: CV Alfabeta.
- Perundang-Undangan dan Dokumen Lainnya**
- Undang- Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai.
- Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil
- Laporan Akhir Penyusunan Analisis Jabatan Dan Capaian Beban Kerja pada BKD Kota Bandar Lampung tahun 2014
- Disertasi, Jurnal dan Skripsi**
- Arie Haryadi. 2011. *Skripsi dengan Judul Pelaksanaan Penempatan Pegawai oleh Kepala Pusat Dalam Upaya Meningkatkan Prestasi Kerja di Bagian Tata Usaha Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan Departemen Pekerjaan Umum*. Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Padjadjaran.
- Lukman Hakim. 2014. *Skripsi dengan Judul Penempatan Pegawai di*

*Bidang Status Kepegawaian dan
Pensiun Kantor Regional III Badan
Kepegawaian Negara Bandung.*
Administrasi Publik FISIP
Universitas Padjadjaran.

Nur Fadilah, Asri *et. al.* (2013). Jurnal
Administrasi Publik. Pengaruh
Penempatan Pegawai Terhadap
Kinerja (Studi pada Pegawai
Sekretariat Daerah Kabupaten
Gresik). Vol.1 No.5 Hal: 847-852.

Rusdiono. 2014. *Disertasi dengan Judul
Penempatan Pegawai Negeri Sipil di
Badan Pengelolaan Kawasan
Perbatasan dan Kerjasama Provinsi
Kalimantan Barat.* Program
Pascasarja Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Padjadjaran

KOORDINASI DALAM PENANGANAN GELANDANGAN PIKOTIK DI KOTA BANDUNG

COORDINATION IN HANDLING PSYCHOTIC VAGRANT IN BANDUNG CITY

Andini Hening Safitri; Ida Widianingsih; Mas Halimah
aheningsafitri@ymail.com; ida.widianingsih@unpad.ac.id; mas.halimah@unpad.ac.id
Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran
Bandung, Indonesia

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini berawal dari fenomena masih sering ditemuinya gelandangan yang menderita gangguan jiwa atau gelandangan psikotik yang terlantar dan berkeliaran di kota-kota besar termasuk Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deduktif dengan mengacu pada koordinasi efektif yang dikemukakan oleh *State Service Commision* (2008), yang didalamnya terdapat tiga dimensi utama dalam koordinasi, yaitu dimensi mandat, sistem dan perilaku. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa koordinasi dalam penanganan gelandangan psikotik di Kota Bandung masih belum berkaitan dengan dimensi mandat, sistem dan perilaku. Agar koordinasi dalam penanganan gelandangan psikotik di Kota Bandung dapat berjalan efektif, diperlukan peningkatan dalam beberapa aspek yang berkaitan dengan dimensi koordinasi, yaitu dalam hal komitmen pemimpin, tujuan yang terdefiniskan secara jelas dan disepakati bersama, kerangka kerja dan akuntabilitas, pengukuran kinerja, ketepatan dan kemampuan perwakilan dan kepemimpinan dalam tim, serta budaya dan nilai bersama.

Kata Kunci: gelandangan psikotik, koordinasi, mandat, sistem, perilaku

ABSTRACT

The background of this research came from the phenomenon are often seen the homeless people with mental illness or psychotic vagrant displaced and wandering in major cities including Bandung. The method used in this study is a qualitative research method with a deductive approach by reference to the effective coordination proposed by the State Services Commission (2008) , in which there are three main dimensions in coordination, the dimensions of the mandate, systems and behaviors. From this research, it can be concluded that the coordination in handling psychotic vagrant in Bandung still not associated with the dimensions of the mandate, systems and behaviors. In order to coordinate the handling of psychotic vagrant in Bandung can be effective, it needs improvement in some aspects related to the dimensions of coordination, namely in terms of commitment to leadership, the goals are clearly defined and agreed together, frameworks and accountability, performance measurement, accuracy and the ability of representation and leadership in the team, as well as shared culture and values.

Keywords: psychotic vagrants, coordination, mandates, systems, behaviors

PENDAHULUAN

Sudah menjadi keharusan bagi suatu negara untuk merespon berbagai macam permasalahan yang muncul dimana permasalahan setiap negara akan berbeda dan akan berbeda pula dalam merespon Permasalahan tersebut (Nugroho,2014:29). Salah satu respon yang ditunjukan adalah merespon masalah sosial yang dilakukan melalui berbagai pelayanan sosial (Suharto,2006:4), dengan memberikan pelayanan berupa penjaminan sosial, perumahan, kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial personal (Suharto,2006:9).

Salah satu fenomena yang menunjukan bahwa masih adanya masalah sosial saat ini diantaranya dapat dilihat dari banyaknya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang sering berkeliaran dan terlantar di jalanan khususnya di kota-kota besar di Indonesia (perpustakaan.bppksyogyakarta.com:2009). Masih ditemuinya fenomena tersebut menuntut keseriusan pemerintah untuk memberikan respon dengan cara memberikan pelayanan kesehatan, penjaminan sosial dan juga memberikan fasilitasi perumahan bagi gelandangan psikotik, yang mana dalam hal ini gelandangan psikotik termasuk kedalam jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menderita gangguan jiwa. Pentingnya peran pemerintah untuk menangani gelandangan psikotik tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28H ayat 1, disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Melihat hal tersebut maka jelaslah bahwa gelandangan psikotik berhak mendapatkan lingkungan yang baik dan mendukung, serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.

Dalam menangani gelandangan psikotik, tidak hanya pemerintah pusat saja yang berperan, tetapi juga menjadi

tanggung jawab pemerintah daerah. Seperti disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa dimana disebutkan pada Pasal 80 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan penatalaksanaan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.

Beberapa daerah di Indonesia memiliki angka gangguan jiwa dan angka gelandangan psikotik yang cukup tinggi, diantaranya adalah Kota Bandung. Dari data Riset Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2007 diketahui bahwa warga pengidap gangguan jiwa di Kota Bandung mencapai 600.000 orang. Angka tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Cimahi pada tahun yang sama yaitu tahun 2007 yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Cimahi berjumlah 536.743 jiwa.

Selain tingginya angka gangguan jiwa di Kota Bandung, pada tahun 2015 Kota Bandung menjadi salah satu daerah di Jawa Barat yang menyumbang pasien gangguan jiwa terbanyak ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dimana hingga bulan September 2015 tercatat bahwa Kota Bandung menyumbang 11.363 pasien di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat dan diantara pasien tersebut terdapat pasien yang merupakan gelandangan psikotik.

Berdasarkan data pasien gelandangan psikotik di Instalasi Kesehatan Jiwa Masyarakat pada tahun 2014 tercatat jumlah pasien gelandangan psikotik yang dirujuk ke RSJ Provinsi Jawa Barat oleh Pemerintah Kota Bandung adalah sebanyak 21 orang, dan jumlah tersebut merupakan jumlah tertinggi diantara daerah lainnya di Jawa Barat.

Tingginya angka gelandangan psikotik di Kota Bandung menuntut Pemerintah Kota Bandung untuk lebih

pro-aktif dalam menangani hal tersebut. Dalam penanganannya tidak dapat satu lembaga saja yang terlibat mengingat gelandangan psikotik ini merupakan kategori gelandangan dan mengidap gangguan jiwa, maka dari itu diperlukan keterlibatan lembaga lain yang berwenang untuk menangani gelandangan psikotik di Kota Bandung secara menyeluruh. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan pasal 33 yang menyebutkan bahwa:

“Dalam rangka penyaringan proses pasien psikotik gelandangan, Dinas melaksanakan koordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Jiwa, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian”

Selain lembaga-lembaga yang disebutkan oleh Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2012 di atas, pihak lainnya yang juga terlibat dalam penanganan gelandangan psikotik adalah Komando Distrik Militer (Kodim) 0618/BS Kota Bandung.

Dalam penanganan gelandangan psikotik di Kota Bandung saat ini, penulis menemukan bahwa terdapat beberapa indikasi masalah dalam koordinasi penanganan gelandangan psikotik, diantaranya adalah belum adanya pedoman yang disepakati bersama yang digunakan oleh pihak yang terlibat, yang berkaitan dengan penanganan gelandangan psikotik di Kota Bandung. Belum adanya pedoman tersebut diantaranya menyebabkan belum adanya pola yang jelas terkait dengan penanganan gelandangan psikotik khususnya terkait dengan penanganan pasca rehabilitasi. Selain itu juga dalam membahas penanganan gelandangan psikotik di Kota Bandung tidak ada pertemuan khusus yang terjadwal rutin dan berkala yang bersifat formal, dan juga Informasi terkait gelandangan psikotik yang tidak merata dimana berdasarkan

pengamatan awal dan wawancara awal yang penulis lakukan, penulis melihat bahwa tidak semua pihak yang terlibat dalam penanganan gelandangan psikotik di Kota Bandung mengetahui dan memiliki data pasti terkait jumlah gelandangan psikotik di Kota Bandung dan mengetahui apakah gelandangan psikotik yang dijangkau benar-benar mendapatkan perawatan yang sesuai hingga mendapatkan rehabilitasi sosial atau tidak. Berdasarkan indikasi yang penulis temukan, maka penulis ingin mengetahui bagaimana koordinasi dalam penanganan gelandangan psikotik di Kota Bandung.

METODE

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deduktif. Pemilihan metode tersebut dikarenakan dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk mencari tahu secara mendalam terkait koordinasi dalam penanganan gelandangan psikotik di Kota Bandung. Kemudian pendekatan deduktif dipilih oleh penulis mengingat dalam penelitian ini penulis mengacu pada teori yang relevan yaitu mengenai dimensi dalam koordinasi. Dengan pendekatan ini penulis dapat memulai melakukan penelitian dengan teori acuan yang relevan (Yin, 2011:95) untuk menggali informasi lebih jauh terkait dengan koordinasi dalam penanganan gelandangan psikotik di Kota Bandung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan teori yang menjadi acuan dalam penelitian yang penulis lakukan, koordinasi dalam penanganan gelandangan psikotik di Kota Bandung dilihat dari tiga dimensi dimana setiap dimensi memiliki aspek-aspeknya sendiri yang diuraikan sebagai berikut:

A. Dimensi Mandat

Pada dimensi ini terdapat tiga aspek yang berkaitan dengan koordinasi, yaitu

komitmen pemimpin, keterlibatan *stakeholder* dan tujuan yang didefinisikan secara jelas dan disepakati bersama.

a. Komitmen Pemimpin

Dalam koordinasi penanganan gelandangan psikotik, komitmen dari pemimpin lembaga-lembaga yang terlibat menjadi sangatlah penting, dimana juga disebutkan oleh *State Services Commission* (2008:12) bahwa “...*the senior leaders have invested significant time and energy modelling and supporting this way of working.*” Komitmen dalam penanganan gelandangan psikotik ini diantaranya dapat terlihat dari diprioritaskannya penanganan gelandangan psikotik oleh lembaga-lembaga yang terlibat dalam penanganan gelandangan psikotik di Kota Bandung, dituangkannya komitmen kedalam bentuk yang formal seperti surat keputusan ataupun juga peraturan bersama, selain itu juga dapat terlihat dari disediakannya sarana prasarana.

Dari penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat bahwa komitmen yang terbentuk masih belum optimal. Dimana saat ini tidak ada program khusus yang berkaitan dengan gelandangan psikotik dan sejauh ini prioritas dalam hal penanganan gelandangan psikotik adalah ketika ditemukan kasus tersebut maka semua lembaga yang terkait dalam penanganan gelandangan psikotik ikut turun tangan dan menindaklanjuti gelandangan psikotik. Selain itu saat ini belum ada satu bentuk komitmen dalam penanganan gelandangan psikotik yang sifatnya formal yang mengatur secara keseluruhan terkait penanganan gelandangan psikotik di Kota Bandung.

Dalam hal sarana prasarana yang disediakan untuk mendukung pelaksanaan penanganan gelandangan psikotik juga masih terdapat kekurangan dimana Pemerintah Kota Bandung tidak memiliki panti rehabilitasi eks-psikotik bagi yang tidak memiliki keluarga. Walaupun demikian, saat ini Dinas Sosial

selaku pihak yang bertanggungjawab dalam hal rehabilitasi sosial sudah berupaya semaksimal mungkin dengan membangun kerja sama dengan panti rehabilitasi swasta ataupun panti rehabilitasi yang berasal dari swadaya masyarakat.

b. Keterlibatan *Stakeholder*

Keterlibatan menjadi kunci utama dari keberlangsungan aktivitas koordinasi. Ketika pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan gelandangan psikotik tidak terlibat, maka penanganan gelandangan psikotik tidak akan berjalan baik. Pada koordinasi penanganan gelandangan psikotik di Kota Bandung ini melibatkan berbagai macam lembaga dimana jika mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2012, disebutkan bahwa lembaga-lembaga yang terlibat dalam penanganan gelandangan psikotik diantaranya adalah Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Satpol PP, Kepolisian dan RSJ. Diluar itu, Pemerintah

Kota Bandung ikut melibatkan Kodim 0618/BS dalam penanganan gelandangan psikotik.

Pada aspek keterlibatan *stakeholder* dalam penanganan gelandangan psikotik, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan saat ini sudah baik. Dimana semua lembaga yang terlibat dalam penanganan gelandangan psikotik sudah berpartisipasi aktif sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Selain itu dalam hal keterlibatan dari masyarakat untuk ikut melaporkan keberadaan gelandangan psikotik juga sudah cukup baik, dimana melalui media pengaduan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bandung yaitu *twitter*, cukup banyak laporan dari masyarakat terkait dengan keberadaan gelandangan psikotik di Kota Bandung.

c. Tujuan yang Jelas dan Disepakati Bersama

Pada dimensi mandat, adanya tujuan yang jelas dan di sepakati bersama merupakan hal yang penting dalam melaksanakan koordinasi penanganan gelandangan psikotik. Mengingat banyaknya lembaga yang terlibat dalam penanganan gelandangan psikotik maka tujuan yang ditetapkan juga haruslah dapat didefinisikan dengan jelas dan disepakati bersama agar hasil yang diinginkan dapat tercapai. Disebutkan juga oleh *State Services Commission* (2008:13) bahwa “.....*If objectives are unclear or not shared, participants may work towards different, incompatible goals and fail to achieve desired outcomes.*”

Penulis melihat bahwa dalam hal tujuan penanganan gelandangan psikotik di Kota Bandung belum didefinisikan dengan baik dan jelas. Hal tersebut dikarenakan belum adanya pedoman bersama yang sifatnya formal yang sudah disepakati oleh masing-masing pihak yang berkoordinasi. Walaupun di satu sisi koordinasi dalam penanganan gelandangan psikotik sudah berjalan dan semua pihak sudah menyepakati untuk melakukan penanganan gelandangan psikotik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kapasitas dan kewenangannya, disisi lain penulis melihat pentingnya membuat pedoman formal yang menguraikan tujuan dan sasaran yang jelas, dimana pedoman tersebut merupakan pedoman yang sudah disepakati bersama. Hal tersebut penulis anggap penting agar nantinya tidak terjadi saling lempar tugas dalam penanganan gelandangan psikotik di Kota Bandung.

B. Sistem

Dimensi sistem dalam koordinasi berkaitan dengan kerangka kerja dan akuntabilitas. Hal lain yang berkaitan dengan dimensi ini adalah adanya ketepatan dan kecukupan sumber daya yang dibutuhkan, proses mengawasi dan menilai bagaimana kinerja dari koordinasi dalam penanganan gelandangan psikotik.

a. Kerangka Kerja dan Akuntabilitas

Adanya kerangka kerja yang jelas yang menjabarkan tugas dan fungsi dari masing-masing pihak, akan mencegah dari adanya tumpang tindih tugas, selain itu juga alur kerja akan menjadi lebih jelas. Dalam aspek kerangka kerja dan akuntabilitas, penulis melihat bahwa hal tersebut belum berjalan dengan baik, dikarenakan belum adanya bentuk pertanggungjawaban khusus yang berkaitan dengan penanganan gelandangan psikotik dan bentuk pelaporan tidak bersifat menyeluruh karena laporan yang dibuat terpisah pada masing-masing lembaga. Selain itu juga penulis melihat bahwa belum adanya kejelasan terkait pemulangan gelandangan psikotik dan eks-psikotik ke keluarganya, serta peran dalam pasca rehabilitasi sosial bagi eks-psikotik. Kemudian juga penulis masih melihat bahwa dalam upaya Perkesmas yang dilakukan oleh Dinas Sosial masih terdapat kendala terkait dengan keberadaan eks-psikotik di panti rehabilitasi.

b. Kecukupan dan Ketersediaan Sumber Daya

Dalam berbagai macam kegiatan, ketersediaan sumber daya merupakan salah satu aspek pendukung yang akan berpengaruh pada keberlangsungan dan keberlanjutan suatu kegiatan. Begitupun juga dengan koordinasi dalam penanganan gelandangan psikotik yang membutuhkan sumber daya termasuk anggaran, dan ketersediaan waktu, agar penanganan yang diberikan dapat lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

Dalam aspek ketersediaan dan kecukupan sumber daya penulis melihat bahwa penanganan gelandangan psikotik sudah difasilitasi dengan anggaran dan waktu yang cukup. Walaupun saat ini belum ada penganggaran secara khusus yang ditujukan untuk koordinasi penanganan gelandangan psikotik dengan

lebih spesifik, namun kegiatan penanganan gelandangan psikotik dapat berjalan dengan bertumpu pada anggaran dari masing-masing lembaga yang terlibat.

c. Pengukuran Kinerja

Mengukur kinerja terhadap suatu kegiatan sangatlah penting, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek. Dengan adanya pengukuran kinerja dapat diketahui sejauh mana keefektifan kegiatan itu dilakukan. Adanya mekanisme pengukuran dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sangatlah penting, terlebih dalam penanganan gelandangan psikotik yang melibatkan banyak pihak. Penulis melihat bahwa dalam aspek pengukuran kinerja dalam penanganan gelandangan psikotik masih belum dipenuhi dengan baik, mengingat tidak adanya sasaran dan indikator yang jelas untuk melihat sejauh mana keberhasilan Pemerintah Kota Bandung dalam menangani gelandangan psikotik.

C. Perilaku

Dimensi perilaku dalam koordinasi penanganan gelandangan psikotik ini berkaitan dengan ketepatan dan kemampuan dari perwakilan serta kepemimpinan tim. Dimensi ini juga berkaitan dengan perilaku dan budaya organisasi diantaranya dapat dilihat dari adanya dukungan setiap organisasi yang terlibat dalam penanganan gelandangan psikotik di Kota Bandung. Selain itu, dimensi ini berkaitan dengan adanya rasa kebersamaan antara pihak yang terlibat dalam koordinasi penanganan gelandangan psikotik di Kota Bandung.

a. Ketepatan, Kemampuan dan Kepemimpinan dalam Tim

Dalam koordinasi penanganan gelandangan psikotik di Kota Bandung yang melibatkan banyak lembaga, melihat kemampuan dan ketepatan orang-orang yang ditunjuk masing-masing lembaga dalam berkoordinasi sangatlah penting.

Selain itu kepemimpinan yang baik dalam koordinasi penanganan gelandangan psikotik akan berdampak pada baik buruknya penanganan yang diberikan.

Pada aspek ini, penulis melihat bahwa dalam hal kemampuan dan ketepatan sudah cukup baik, dimana pihak yang terlibat melakukan kegiatan sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Selain itu juga pihak-pihak terkait sudah mampu berkomunikasi dengan baik dan memanfaatkan teknologi, walaupun pertukaran informasi masih belum menyeluruh. Hanya saja dalam hal kepemimpinan tim belum dapat dirasakan, mengingat dalam penanganan gelandangan psikotik ini belum terbentuk tim khusus yaitu TP-KJM, dan hanya terdapat tim-tim kecil yang kadang berubah-ubah.

b. Budaya Organisasi yang Mendukung Koordinasi

Dalam koordinasi yang melibatkan banyak pihak, maka budaya organisasi dari masing-masing pihak tersebut menjadi suatu hal yang sangat penting. salah satu upaya untuk membangun hal tersebut diantaranya dengan adanya dukungan dengan mengintegrasikan kegiatan yang dilakukan dalam koordinasi ke dalam lembaga dari masing-masing pihak yang terlibat, seperti adanya program atau kegiatan pendukung dalam penanganan gelandangan psikotik di masing-masing lembaga yang terlibat (*State Services Commission*, 2008:17).

Terkait dengan aspek budaya organisasi yang mendukung koordinasi dalam penanganan gelandangan psikotik penulis menilai bahwa aspek tersebut sudah cukup mendukung. Hal tersebut terlihat dari adanya kegiatan lain yang dilakukan oleh beberapa lembaga, sehingga bentuk dukungan tersebut akan mempermudah dalam pelaksanaan penanganan gelandangan psikotik di Kota Bandung.

c. Budaya dan Nilai Bersama

Adanya budaya dan nilai bersama dari pihak yang berkoordinasi dalam penanganan gelandangan psikotik diantaranya ditandai dengan adanya kebersamaan yang terbangun dengan baik dan nilai yang dijunjung bersama oleh masing-masing pihak.. Selain itu, pemahaman yang baik dari masing-masing pihak yang terlibat terkait bagaimana tugas pokok dan fungsi dari lembaga lain. Dengan adanya nilai yang dianut bersama dan pemahaman yang baik antar masing-masing pihak diharapkan rasa kepemilikan akan terbentuk dan dapat mendukung koordinasi penanganan gelandangan psikotik di Kota Bandung.

Dari penelitian yang penulis lakukan, saat ini dalam penanganan gelandangan psikotik di Kota Bandung belum ada nilai yang dijunjung bersama. Namun demikian dalam hal pemahaman dan saling mengerti akan tugas pokok dan fungsi antar masing-masing lembaga sudah terdapat satu pemahaman yang cukup baik.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diuraikan oleh penulis pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa koordinasi dalam penanganan gelandangan psikotik belum sepenuhnya berkaitan dengan dimensi mandat, dimensi sistem dan dimensi perilaku, dimana hanya beberapa hal saja yang sudah cukup baik dan sudah dipenuhi dari ketiga dimensi tersebut, yaitu yang berkaitan dengan keterlibatan *stakeholder*, kecukupan dan ketersediaan sumber daya dan budaya organisasi yang mendukung koordinasi. Untuk hal lainnya seperti komitmen pemimpin, tujuan yang jelas dan disepakati bersama, kerangka kerja dan akuntabilitas, pengukuran kinerja, ketepatan dan kemampuan perwakilan juga kepemimpinan dalam tim serta pertukaran budaya dan nilai bersama yang masih belum terbentuk dengan baik.

Saran

Saran penulis untuk koordinasi dalam penanganan gelandangan psikotik di Kota Bandung, yaitu:

1. Membentuk TP-KJM Kota Bandung. Dengan dibentuknya tim tersebut diharapkan penanganan terhadap gelandangan psikotik dapat lebih menyeluruh dan penanganan tidak hanya dilakukan hingga tahap rehabilitasi sosial saja, melainkan pada *pasca* rehabilitasi sosial.
2. Membuat pedoman penanganan gelandangan psikotik yang disepakati bersama. Dengan adanya pedoman tersebut diharapkan kerangka kerja dalam penanganan gelandangan psikotik akan lebih jelas dan menyeluruh. Selain itu dengan adanya pedoman yang disepakati bersama, hal-hal yang berkaitan dengan tujuan, sasaran dan indikator kegiatan dapat dijabarkan dengan jelas.
3. Membuat pendataan terkait gelandangan psikotik secara lebih merinci, terkait dengan jumlah gelandangan psikotik yang berhasil dijangkau, yang dikembalikan kembali kepada keluarga, gelandangan psikotik yang dirujuk, gelandangan psikotik yang direhabilitasi dan dimana yang bersangkutan tersebut direhabilitasi.
4. Melakukan rapat evaluasi yang jangka waktunya ditetapkan. Adanya rapat evaluasi ini bertujuan untuk melakukan penyebaran informasi terkait gelandangan psikotik di Kota Bandung dan mengevaluasi sudah sejauh mana penanganan gelandangan psikotik dilakukan serta apa saja kendala yang ditemui dalam penanganan gelandangan psikotik.
5. Melakukan *follow-up* pada saat pemulangan gelandangan psikotik ataupun juga eks-psikotik kepada pihak keluarga. *Follow-up* yang dilakukan dapat berupa kunjungan rumah dari pihak Pemerintah Kota

Bandung disertai pihak dinas tempat asal yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Centre for Mental Health, Department of Health, Mind, NHS Confederation Mental Health Network, Rethink Mental Illness, Turning Point. 2012. *No Health Without Mental Health: Implementation Framework*. London.

Creswell, John W. 2014. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Manullang, M. (2006). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada

New Zealand Office of the Controller and Auditor General. 2003. *Key Success Factors for Effective Coordination and Collaboration Between Public Sector Agencies*. New Zealand: Report of the Controller and Auditor General

Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Ritchie, Jane., dan Jane Lewis. 2003. *Qualitative Research Practice A Guide for Social Science Students and Researchers*. London: Sage Publications.

State Services Commission. 2008. *Factors for Successful Coordination - A Framework to Help State Agencies Coordinate Effectively*. New Zealand: State Services Commission

Sugandi, Yogi S. 2011. *Administrasi Publik Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sung Min, Park., dan Kim Seona. 2014. *Public Management A Case Handbook*. Seoul: Sungkyunkwan University Press

Syafie, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Publik (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT.Rineka Cipta

Syafri, Wirman. 2012. *Studi tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga

Sugiyono.2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Yin, Robert K.. 2011. *Qualitative Research from Start to Finish*. United States Of America: The Guilford Press.

Jurnal

Boella, Guido., Leendert van der Torre.2005. *Coordination and Organization Definitions, Examples and Future Research*. Electronic Notes in Theoretical Computer Science Directions

Harpham, Trudy., Michael Reichenheim, Rebecca Oser, Elizabeth Thomas, Narmeen Hamid, Surinder Jaswal, Ana Ludermir dan Magna Aidoo. 2003. *Measuring mental health in a cost-effective manner*. Oxford University Press Health policy and planning;18(3):344-9.

Iskandar, Shelly., Dien Mardiningsih., Deni Kurniadi Sunjaya., Arifah Nur Istiqomah., & Teddy Hidayat. 2013. *Menuju Jawa Barat Bebas Pasung: Komitmen Bersama 5 Kabupaten Kota*.

Král, Jaroslav. 2007. Introduction to Coordination Concept Suharto, Edi. 2006. *Kebijakan Sosial*.

Tim Peneliti Balitbang Provinsi Jawa Tengah. 2007. *Study Penanganan Masalah Sosial Gelandangan Psikotik di Wilayah Perbatasan dan Perkotaan*. Semarang: Balitbang Jawa Tengah

Vanagas, Ramunas., dan Janina Stakevic. 2014 *Impact of Coordination for Organization Process*. Intellectual Economics, Vol.8, No.2(20), p. 112-125

_____. _____. *Qualitative Research Introduction*. Washington, DC:

Center for Teaching, Research & Learning.

Skripsi

Mediana, Viska. 2012. *Analisis Koordinasi Dinas Perhubungan dalam Penyediaan Pelayanan Jasa Transportasi Angkutan Kota di Depok*. Depok: Universitas Indonesia

Dokumen

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1966 Tentang Kesehatan Jiwa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang

Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 220/MENKES/SK/III/2002 Tentang Pedoman Umum Tim Pembina, Tim Pengarah, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP – KJM)

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 440.05/Kep.372/Yansos/2014 Tentang Tim Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Jawa Barat

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Sistem Kesehatan Kota Bandung.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Dan Susunan

- Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
- Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2016
- Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Provinsi Jawa Barat Tahun 2007
- Lampiran III Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2015 Laporan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sarana dan Prasarana Panti
- Persinggahan Rumah Singgah Kota Bandung Periode Juli s/d Desember 2014
- Laporan Pasien Gelandangan Psikotik Instalasi Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Periode Januari s/d Agustus 2015
- Riset Kesehatan Dasar Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2010
- Riset Kesehatan Dasar Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2013
- Strategi Nasional Sistem Kesehatan Jiwa Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2015
- Internet**
- http://www.kompasiana.com/naftalia/awas-ada-orang-gila-edisi-hari-kesehatan-jiwa-sedunia_561bdef06c7a61f90b8b456b (Diakses 28 November 2015 pukul 12:48)
- <http://www.unpad.ac.id/profil/dr-suryani-skp-mhsc-setiap-tahun-penderita-gangguan-jiwa-di-indonesia-terus-meningkat/> (Diakses 28 November 2015 pukul 13:39)
- <http://psikotikz.blogspot.co.id/2013/12/rehabilitasi-sosial-gelandangan-psikotik.html> (Diakses 10 Februari 2016 pukul 14:20)
- <http://bandungekspres.co.id/2015/penyandang-psikotik-alami-penurunan/> (Diakses 13 April 2016 pukul 13:15)
- <http://bandung.merdeka.com/halo-bandung/dinsos-imbau-masyarakat-tak-beri-uang-anak-punk-dan-gepeng-di-jalanan-160106z.html> (Diakses 15 April 2016 pukul 10:12)
- <http://portal.bandung.go.id/wakil-wali-kota-bandung-berikan-bantuan-sosial> (Diakses pada 20 Mei 2016 pukul 18:40)
- <http://bandungekspres.co.id/2015/sebar-orang-gila-di-bandung-barat/2/> (Diakses 24 Mei 2016 pukul 15:54)
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/03/15/o433zw280-15-titik-penyebaran-pmks-kota-bandung-terus-dipantau> (Diakses 31 Mei 2016 pukul 18:07)
- <http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2015/11/21/350770/inilah-umk-jabar-2016-yang-ditetapkan-gubernur> (Diakses 9 Juni 2016 pukul 21:17)
- <http://dinsos.bandung.go.id/BeritaFront/Detail/38> (Diakses pada 15 Juni 2016 pukul 14:29)
- http://perpustakaan.bbppsakyogyakarta.com/index.php?p=show_detail&id=2044 (Diakses pada 15 Juni pukul 14:57)

<http://rsj.jabarprov.go.id/?viewPage=Rawat.JiwaIntensif&mk=3&im=25&lang=id> (Diakses pada 15 Juni 2016 pukul 17:15)

<http://rsj.jabarprov.go.id/?viewPage=tenang&mk=3&im=26&lang=id> (Diakses pada 15 Juni pukul 17:17)

https://twitter.com/Dinsos_BDG/media (Diakses pada 22 Mei 2016 pukul 18:07)

<https://twitter.com/search?src=typd&q=psikotik%20bandung> (Diakses pada 22 Mei 2016 pukul 18:15)

<https://twitter.com/FKTKSKBANDUNG/status/676984148872032256> (Diakses pada 22 Mei 2016 pukul 18:27)

**KUALITAS PELAYANAN PERPUSTAKAAN DI BADAN PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

***QUALITY OF LIBRARY SERVICES AT LIBRARY AND ARCHIVES OF REGIONAL
WEST JAVA***

Deviana Fadhlya; Yogi Suprayogi; Imanudin
yogi.suprayogi@unpad.ac.id; imanuding@unpad.ac.id
Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran
Bandung, Indonesia

ABSTRAK

Salah satu misi dari perpustakaan BAPUSIPDA adalah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, namun tujuan tersebut berbanding terbalik dengan kondisi yang ada dengan munculnya beberapa permasalahan di meja layanan. Maka dari itu penulis ingin mencari tahu kualitas layanannya dengan menggunakan metode kualitatif dan menggunakan dimensi kualitas pelayanan sebagai rujukannya, serta menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman untuk penarikan kesimpulan dan verifikasi. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan perpustakaan di BAPUSIPDA sudah memenuhi dimensi kualitas pelayanan.

Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, Pelayanan Publik, Pelayanan Perpustakaan

ABSTRACT

One of BAPUSIPDA's library missions is to provide excellent service to public, but that goal is inversely proportional to the existing conditions with the various problems in some public service desk. That's why the author want to research about its quality by use qualitative method and use service quality dimension as a reference, then use the technique interactive analysis by Miles and Huberman to get conclusion and verification. The result of this research indicate that quality of library services in BAPUSIPDA already occupied service quality dimensions.

Keywords: *Quality Services, Public Services, Library Services*

PENDAHULUAN

Salah satu pelayanan public yang diselenggarakan pemerintah terkait dengan peningkatan ilmu pengetahuan dan peningkatan minat baca terhadap masyarakat adalah pelayanan perpustakaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang No.43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, bahwa perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Pada pasal 8

Undang-Undang No.43 Tahun 2007 dipaparkan bahwa pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota berkewajiban untuk menjamin penyelenggaraan perpustakaan di daerah dengan menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing, kemudian menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat.

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki lingkungan pendidikan yang baik dan strategis, hal ini

dapat dilihat dari banyaknya sekolah dan perguruan tinggi yang berada di daerah provinsi Jawa Barat, selain jumlahnya yang banyak, sekolah-sekolah dan perguruan tinggi di Jawa Barat merupakan sarana pendidikan yang memiliki nilai akreditasi yang baik dan terkenal di kalangan masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang tertarik dan bercita-cita ingin menjalani pendidikan berjenjang dari mulai sekolah dasar sampai perkuliahan di Jawa Barat.

Dari fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada unit pelayanan perpustakaan di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat (BAPUSIPDA) yang berlokasi di Jl. Kawalayaan Indah II No. 4, Sukapura, Kiaracondong, Kota Bandung dan terbentuk oleh Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat yang kini diubah dengan Peraturan Daerah No.15 Tahun 2011. Penulis mengambil penelitian mengenai bidang layanan otomasi perpustakaan yang dalam pelaksanaan pelayanan perpustakaannya. Adapun BAPUSIPDA sedang melakukan peningkatan dan inovasi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, peningkatan ini terjadi karena munculnya berbagai permasalahan di beberapa meja layanan masyarakat, diantaranya:

- 1) Pemustaka (pengunjung) harus antri cukup panjang untuk mendapatkan pelayanan petugas saat peminjaman koleksi, antrian juga terjadi di meja peminjaman dan pengembalian koleksi, untuk menjadi anggota perpustakaan pun pemustaka harus antri karena petugas pendaftaran harus menginput satu persatu data ke dalam sistem informasi dengan jumlah kolom informasi yang cukup banyak. Berikut

disajikan tabel lamanya waktu layanan:

**Tabel 1.1 Waktu Pelayanan
Perpustakaan BAPUSIPDA**

No	Jenis Layanan	Waktu Menunggu (Menit)
1	Peminjaman Koleksi	5 s/d 20
2	Pengembalian Koleksi	5 s/d 15
3	Pendaftaran Anggota	10 s/d 30
4	Pengisian Buku Tamu	1 s/d 5

(Sumber: Observasi awal penulis terhadap pengunjung)

Masalah selanjutnya adalah, perpustakaan tidak memiliki standar yang pasti dalam menentukan lamanya waktu pelayanan yang diberikan untuk beberapa jenis layanan tersebut.

- 2) Pemustaka merasa kesal karena ketidakramahan pustakawan saat pemustaka melakukan kegiatan di perpustakaan. Hal ini dinyatakan oleh pemustaka yang merasa petugas tidak memberikan informasi yang jelas dan tidak memberikan solusi ketika pemustaka bertanya terkait layanan perpustakaan.
- 3) Untuk memperpanjang koleksi, pemustaka diharuskan untuk datang ke Perpustakaan Umum Jawa Barat, hal ini diakui pemustaka tidak memudahkan pemustaka yang bertempat tinggal jauh dari perpustakaan. Sebaiknya, perpanjangan koleksi bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi berupa website yang secara online dapat diakses dengan mudah untuk pemustaka yang ingin memperpanjang koleksi tanpa harus datang ke perpustakaan.
- 4) Saat berkunjung, pemustaka direpotkan dengan kewajiban menulis buku tamu secara manual di buku besar

tamu yang disediakan, dari mulai masuk ke *lobby* perpustakaan, sampai ke ruangan yang ingin dituju, sehingga pemustaka harus berkali-kali menulis buku tamu. Adanya pengisian buku tamu ini dibutuhkan oleh pustakawan untuk melihat statistik pengunjung yang datang ke perpustakaan.

- 5) Pemustaka merasa terganggu ketika mereka sedang asik saat membaca atau melakukan kegiatan lain di perpustakaan namun harus meninggalkan perpustakaan pada saat petugas layanan istirahat, serta waktu tutup masyarakat. Pemustaka merasa waktu buka perpustakaan harus dibuka lebih lama agar mereka bisa berlama-lama di dalam perpustakaan.

Dari beberapa indikasi masalah diatas yang terjadi di meja layanan perpustakaan, maka layanan perpustakaan di BAPUSIPDA harus memiliki wajah baru untuk menjaga minat masyarakat dan pemustaka untuk tetap berkunjung ke perpustakaan agar merasa dilayani dengan baik. Untuk itu, diperlukan inovasi atau upaya untuk menjawab permasalahan-permasalahan diatas sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan perpustakaan BAPUSIPDA. Pada akhir tahun 2015, BAPUSIPDA mencoba menerapkan layanan perpustakaan dengan memanfaatkan teknologi terkini untuk memberikan akses seluas-seluasnya terhadap informasi yang dimiliki Perpustakaan Umum Jawa Barat.

METODE

Pada penelitian mengenai kualitas pelayanan perpustakaan di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.

Dalam penelitian terhadap kualitas pelayanan perpustakaan di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, berikut diantaranya aspek-aspek yang diteliti oleh penulis:

- a. Aktor, yaitu pelaku aktivitas yang sedang diteliti dan memiliki peran dalam penelitian, dalam penelitian ini maka aktornya adalah pegawai BAPUSIPDA dan masyarakat pengunjung perpustakaan;
- b. Aktivitas, yaitu kegiatan yang tengah dan pernah dilakukan aktor;
- c. Tempat, yaitu lokasi berlangsungnya aktivitas yang dilakukan aktor pada waktu tertentu, dalam penelitian ini lokasinya adalah perpustakaan di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu dengan melakukan wawancara dan observasi, wawancara disesuaikan dengan dimensi kualitas pelayanan yang dikemukakan oleh Berry, Zeithaml, dan Parasuraman.

Penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dalam penentuan informan. Informan dalam penelitian ini adalah petugas layanan perpustakaan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, dan beberapa pengunjung perpustakaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rincian Informan Penelitian

Pekerjaan	Jumlah	Rincian
Pustakawan BAPUSIPDA	1 orang	Informan I
Outsourcing Petugas Layanan Perpustakaan BAPUSIPDA	1 orang	Informan II
Masyarakat Umum atau Pengunjung		
(a) Pegawai Kantor	1 orang	Informan III
(b) Mahasiswa FKG UNPAD	1 orang	Informan IV
(c) Pelajar SMA BPI BANDUNG	1 orang	Informan V
(d) Pelajar SMP Gemilang	1 orang	Informan VI
(e) Ibu Rumah Tangga	1 orang	Informan VII
Jumlah	7 orang	

(Sumber: Diolah penulis, 2016)

Penulis menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman (Miles dan Huberman dalam Idrus (2009:147), model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu:

- 1) Reduksi data;
- 2) Penyajian data;
- 3) Penarikan kesimpulan/verifikasi.

Agar dapat terpenuhinya validitas data dalam penelitian kualitatif, penulis melakukannya dengan cara antara lain:

- a. Memperpanjang observasi;
- b. Pengamatan yang terus-menerus;
- c. Menganalisis kasus negatif;
- d. Menggunakan bahan referensi.

Adapun untuk reliabilitas, penulis melakukan pengamatan secara sistematis, berulang dan dalam situasi yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis mendeskripsikan bagaimana kualitas pelayanan perpustakaan di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat yang diukur melalui aspek-aspek dimensi kualitas pelayanan oleh Zeithaml, Parasuraman, dan Berry yang terbagi menjadi lima aspek, diantaranya:

- 1) *Tangibles* (bukti fisik),
- 2) *Reliability* (kepercayaan),
- 3) *Responsiveness* (daya tanggap),
- 4) *Assurance* (jaminan),
- 5) *Emphaty* (empati).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis, untuk aspek-aspek *tangibles* pengunjung merasa kebutuhannya terpenuhi, penampilan petugas perpustakaan rapih, dan sopan. Kemudian, terdapat banyak fasilitas yang dapat membantu pengunjung seperti layanan membaca, kemudian layanan edukatif, dan rekreasi yang disediakan oleh BAPUSIPDA. Lalu, BAPUSIPDA memanfaatkan teknologi informasi yang dipadukan dengan perangkat keras pendukung pengelolaan perpustakaan, baik yang menggunakan teknologi barcode maupun RFID (*Radio Frequency Identification*) seperti pengadaan koleksi,

pengolahan bahan pustaka, pencatatan keanggotaan dan sirkulasi koleksi secara *online*.

Untuk aspek *reliability*, berdasarkan hasil wawancara dan observasi, petugas perpustakaan telah melakukan pelayanan dengan tepat, cepat, dan juga cermat, hal ini dilihat dari jawaban pengunjung yang merasa puas akan layanan yang diberikan petugas perpustakaan kepada mereka. Kemudian, perpustakaan BAPUSIPDA juga tentunya memiliki standar yang jelas dalam melakukan pelayannya.

Mengenai aspek *responsiveness*, untuk menarik pengunjung agar datang kembali ke Perpustakaan BAPUSIPDA maka pengunjung harus bisa memecahkan permasalahan yang dirasakan oleh pengunjung, misalnya saat peminjaman buku, pengembalian buku, petugas perpustakaan harus siaga dalam memberikan arahan dan pelayanan kepada pengunjung agar pengunjung tidak mengalami antrian dalam meja layanan. Menurut pengunjung yang datang ke perpustakaan BAPUSIPDA, petugas perpustakaan sudah sangat menanggapi keinginan pengunjung, ketika pengunjung memiliki kesulitan dalam melakukan pelayanan. BAPUSIPDA menggunakan layanan berbasis teknologi, secara tidak langsung teknologi ini menjadi perangkat atau barang yang baru dan aneh di masyarakat, dan pengunjung juga menjelaskan bahwa ada ketakutan untuk menggunakannya. Tapi, berbagai cara dilakukan oleh petugas perpustakaan dalam melayani dan memperkenalkan teknologi tersebut kepada pengunjung dengan cara di setiap perangkat disediakan petunjuk tatacara pengoperasian perangkat, kemudian petugas layanan selalu memberikan arahan kepada pengunjung untuk menggunakan perangkat tersebut, petugas akan memberikan bimbingan pada pemustaka untuk menggunakan perangkat tersebut. Dengan cara demikian, maka pemustaka atau pengunjung merasa petugas perpustakaan memiliki daya

tanggap yang baik dalam melakukan proses pelayanan perpustakaan di Badan Perpustakaan BAPUSIPDA.

Jika dilihat menurut aspek *Assurance*, perpustakaan BAPUSIPDA telah memberikan jaminan tepat waktu, jaminan legalitas, dan jaminan kepastian biaya dalam pelayanan, semua jaminan itu dilihat dari cepatnya pelayanan yang diberikan petugas kepada pengunjung dengan tepat dan cermat, selain itu BAPUSIPDA sudah dipastikan legal karena perpustakaan merupakan fasilitas pendidikan yang disediakan oleh pemerintah provinsi Jawa Barat, dan pelaksanaan petugas dan mekanisme kerjanya diatur oleh Keputusan Gubernur. Adapun pengunjung sama sekali tidak dikenakan biaya dalam melakukan pelayanan.

Adapun pada aspek *emphaty*, pengunjung merasa didahulukan kepentingannya, hal ini dilihat dari petugas yang mengunjungi titik-titik layanan secara rutin, kemudian jika ada pengunjung yang ingin mengetahui lebih banyak tentang perpustakaan atau buku-buku, maka petugas akan segera melayani dan memberikan eukasi terhadap hal yang ditanyakan oleh pengunjung. Kemudian sikap petugas perpustakaan kepada pengunjung juga ramah dan sopan, sehingga pengunjung perpustakaan merasa dihargai dan dihormati oleh petugas perpustakaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis melalui pengamatan langsung ke lokasi perpustakaan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat (BAPUSIPDA) dan setelah wawancara kepada informan yang merupakan pustakawan, petugas *outsourcing* layanan perpustakaan, serta beberapa pengunjung perpustakaan mengenai kualitas pelayanan perpustakaan di BAPUSIPDA, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas

pelayanan perpustakaan di BAPUSIPDA sudah baik.

Hal ini dilihat dari terpenuhinya aspek-aspek dimensi kualitas pelayanan dari Zeitahml, Pasuraman, dan Berry. Dimana kualitas layanan perpustakaan di BAPUSIPDA sudah memenuhi aspek *tangibles* (bukti fisik), *reliability* (keandalan atau kepercayaan), *responsiveness* (daya tanggap), *assurance* (jaminan), dan *emphaty* (empati) terhadap pengunjung.

Perpustakaan telah melakukan inovasi pelayanan publik pada layanan perpustakaannya, perpustakaan BAPUSIPDA menggunakan teknologi sebagai bentuk peningkatan kualitas dalam memennuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan.

Pengunjung sudah merasa puas dan senang atas pelayanan yang diberikan kepada mereka, meskipun dari pustakawan dan petugas perpustakaan yang lain menyebutkan bahwa masih perlu ada peningkatan-peningkatan dalam kualitas pelayanannya agar semakin baik dan mumpuni.

Pengunjung juga tidak perlu membuang banyak waktu untuk antri di meja-meja layanan perpustakaan, akurasi data transaksi peminjaman dan pengembalian lebih terjaga, serta masyarakat diajak untuk mengenal teknologi terkini dalam mendapatkan layanan perpustakaan.

Selain itu, keberhasilan layanan perpustakaan BAPUSIPDA dilihat dari penghargaan yang didapatkan dari Kementrian Pendidikan dan Budaya mengenai pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat lewat perpustakaan ini. Kemudian, statistik pengunjung dari bulan ke bulan semenjak adanya inovasi pelayanan publik di perpustakaan BAPUSIPDA menunjukkan peningkatan, pengunjung pun datang bukan hanya dari masyarakat lokal, namun ada juga dari masyarakat interlokal yang ingin mengetahui pengelolaan perpustakaan BAPUSIPDA.

SARAN

Adapun untuk menjaga kualitas yang baik yang dimiliki Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, maka perlu dilakukan keberlanjutan inisiatif inovasi ini dengan terus melakukan perbaikan-perbaikan seperti melakukan pemeliharaan perangkat lunak secara periodic untuk menjaga *performance system* supaya memiliki *respo time* yang selalu baik.

Kemudian, dilakukan pemeliharaan terhadap seluruh fasilitas yang disediakan perpustakaan, baik perangkat maupun benda-benda non digital, seperti buku, koleksi perpustakaan, dan fasilitas lainnya, juga kebersihan perpustakaan.

Selain itu, melakukan kajian terhadap Sistem Operasional Prosedur untuk meningkatkan mekanisme layanan yang lebih baik lagi, dan mengevaluasi tingkat kunjungan dan transaksi peminjaman pengembalian yang terjadi untuk menghitung jumlah fasilitas baik dari segi teknologi maupun koleksi perpustakaan yang tersedia apakah masih memadai atau tidak.

Keramahan dan kesopanan pegawai serta kedisiplinannya harus selalu terjaga agar pengunjung yang datang bisa tertarik untuk kembali datang ke perpustakaan BAPUSIPDA.

Selanjutnya semoga pelayanan yang diberikan dengan wajah baru yang ditampilkan membuat keberadaan perpustakaan yang ada di lingkup BAPUSIPDA dapat lebih kuat dalam membangun hubungan antara pustakawan dan pemustakanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Doherty, Tony L., Home, Terry.
*Managing Public Services-
Implementing Changes*, New York
and London: Routledge.
- Denhardt, Janet V., Denhardt, Robert B.
2007. *The New Public Service*
- Serving, Not Steering*, New York
and England: M.E Sharpe.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode
Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta:
PT Gelora Angkasa Pratama.
- Le Grand, Julian. 2007. *The Other
Invisible Hand*, New Jersey:
Princeton University Press.
- Omachonu, Vincent K., Ross, Joel E.
Principles of Total Quality,
Washington: CRC Press.
- O'Toole, Barry J. 2006. *The Ideal of
Public Service (Reflection on the
Higher Civil Service in Britain)*,
New York: Routledge.
- Ratminto dan Winarsih. 2005.
Manajemen Pelayanan, Yogyakarta:
Pustaka Belajar.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2010.
Reformasi Pelayanan Publik,
Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Lestari, Ratih Tri. *Persepsi Masyarakat
Tentang Kualitas Pelayanan
Perpustakaan Kantor Perpustakaan
dan Arsip Daerah Kabupaten
Banjarnegara*. UNDIP, 1-2.
- Mbunuong, Risno. 2013. *Implementasi
Kode Etik Pustakawan Dalam
Meningkatkan Kualitas Knerja
Pelayanan Pustakawan di Badan
Perpustakaan, Arsip, dan
Dokumentasi Provinsi Sulawesi
Utara*. Vol II No.4, 1-13.
- Nurendah, Yulia., Mulyana, Mumuh.
2013. *Analisis Pengaruh Kualitas
Pelayanan Perpustakaan Terhadap
Kepuasan dan Hubungannya dengan
Loyalitas Mahasiswa*. Bogor, 91.
- Sari, Mirajtannia Perwita., Sulistiowati.,
Lemantara, Julianto. 2014. *Analisis*

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pengunjung Perpustakaan. Surabaya, Vol 3 No.1, 116-125.

Supriatin, In., Sukaesih., Saleha, Rodiah. 2012. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Sirkulasi Terhadap Pencitraan Perpustakaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor*. UNPAD, Vol 1 No.1, 1-15.

Wolok, Eduart., Wunarlani, Irwan. *Analisis Kualitas Pelayanan Perpustakaan Negeri Gorontalo Dengan Metode Importance Performance Analyse*.

Butuni, J.Al. (n.d.) . Diskresi Pemerintah dalam Pelayanan Publik Peluang dan Tantangan website:
https://www.academia.edu/4834674/DISKRESI_PEMERINTAH_DAERAH_DALAM PELAYANAN_PUBLIK_PELUANG_DAN_TANTANGAN

Mustapa, Jainudin. (2011) Reformasi Birokrasi Melalui *E-Governance*: Peluang atau Tantangan dalam Pelayanan Publik?. Retrieved from Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIT Makassar website:
<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=387671&val=7060&title=Reformasi%20Birokrasi%20Melalui%20E-Governance%20:%20Peluang%20atau%20Tantangan%20Dalam%20Pelayanan%20Publik%20>

Puspitasari, Dyah Ayu. (2012). *Correlation of Library's Service Quality with College Students Attitude toward Information Seeking in Thesis Writing*. Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjajaran website:
<http://library.fikom.unpad.ac.id/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&i>

d=jbptunpadfikom-gdl-dyahayupus-5481

Supriyadi, Yudi. (2012). Tantangan, Analisis dan Jawaban untuk Pelayanan Publik Prima website:
<http://yudisupriadisangpengabdi.blogspot.co.id/2012/04/tantangan-analisis-dan-jawaban-untuk.html>

Tigaras, Widi. (2011). *The Quality of Library Services Based on The Perceptions And Expectations of Users in Cisral Unpad Library*. Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjajaran website:
<http://library.fikom.unpad.ac.id/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&iid=jbptunpadfikom-gdl-widitigara-4303>

Isi Pembukaan UUD 1945 RI.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelayanan Publik.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor:
63/KEP/M.PAN/7/2003.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 6 Tahun 2010.

UU No.25 Tahun 2009.

**PEMANTAUAN KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI
KECAMATAN GARUT KOTA OLEH TIM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA KABUPATEN GARUT**

***THE MONITORING ACTIVITIES STRUCTURING STREET VENDORS POLICY IN
GARUT KOTA SUBDISTRICT BY TEAM ARRANGEMENT AND EMPOWERMENT
OF STREET VENDORS GARUT***

Kurnia Muhamad Ramdhan; Asep Sumaryana; Slamet Usman Ismanto
kurniamr@yahoo.com; asep.sumaryana@unpad.ac.id; slamet.ismanto@unpad.ac.id
Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran
Bandung, Indonesia

ABSTRAK

Skripsi ini berupaya menyajikan hasil penelitian yang merefleksikan kegiatan Pemantauan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Garut Kota oleh Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Garut. Latar belakang dari penelitian ini ialah tercetusnya kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima yang diprakarsai pada era kepemimpinan Rudy Gunawan selaku Bupati Garut Periode 2014 – 2019, sebagai upaya dalam menata kembali pusat perkotaan dan menertibkan para Pedagang Kaki Lima yang berjualan di sekitar pusat kota, hingga dalam praktiknya ditemukan suatu kendala dari pelaksanaan kebijakan tersebut yang disebabkan karena tidak efektifnya kegiatan pemantauan (*monitoring*) kebijakan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari William N. Dunn (1999), beliau mengemukakan bahwa Pemantauan setidaknya memainkan empat fungsi yaitu Eksplanasi, Akuntansi, Pemeriksaan, dan Kepatuhan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan berupa observasi non-partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik triangulasi sumber dijadikan sebagai pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini, kemudian data-data tersebut direduksi, disajikan, dan ditarik simpulan. Berdasarkan penelitian Penulis, nyatanya kegiatan pemantauan kebijakan tidak dapat dipandang sebelah mata, dikarenakan pemantauan kebijakan memiliki peran yang vital dalam menilai dan mengawal sejauh mana kebijakan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan koridor tujuan dan sasaran kebijakan tersebut, sehingga Pemantauan Kebijakan tidak dapat hanya dimaknai secara harfiah saja, perlu dilakukan elaborasi yang mendalam, seperti pada aspek Kepatuhan, Pemeriksaan, Akuntansi, dan/ atau Eksplanasi, karena hasil dari pemantauan kebijakan dapat dijadikan acuan untuk melakukan upaya koreksi/ modifikasi kebijakan.

Kata Kunci: Pemantauan Kebijakan, Penataan Pedagang Kaki Lima, Eksplanasi, Akuntansi, Pemeriksaan, Kepatuhan

ABSTRACT

This paper presents the results of research that seeks to reflect the monitoring activities Structuring Street Vendors Policy in Garut Kota subdistrict by Team Arrangement and Empowerment of Street Vendors Garut. The background of this study is that the conclusions of the policy Structuring Street Vendor initiated the era of the leadership of Rudy Gunawan as Garut Regent Period of 2014 - 2019, as an effort to restructure the urban centers and curb the street vendors who sell at around the center of town, up in practice

found a constraint on the implementation of the policy caused by lack of effective monitoring policy.

The theory used in this study came from William N. Dunn (1999), he argued that the monitoring of at least play four functions, namely Explanation, Accounting, Auditing, and Compliance. This research is conducted by using descriptive and qualitative approach. Data obtained using literature study and field studies in the form of non-participant observation, in-depth interviews, and documentation. Triangulation techniques serve as a source of data validity checking in the study, then the data is reduced, presented, and the conclusions drawn. Based on the study of author, in fact monitoring policy can not be underestimated, because the monitoring policy has a vital role in assessing and guarding the extent to which the policy is being implemented to run in accordance with the corridor aims and objectives of the policy. So, the monitoring policy can not be simply interpreted a literal, depth elaboration is necessary, as in the aspect of Compliance, Auditing, Accounting, and/ or Explanation, because the results of the monitoring policy could be use as a reference to make efforts correction/ modification of the policy.

Keywords: Policy Monitoring, Arrangement of Street Vendors, Explanation, Accounting, Auditing, Compliance

PENDAHULUAN

Garut Kota merupakan kecamatan yang terletak di Kabupaten Garut, Jawa Barat, dengan jumlah penduduk sebanyak 130.321 jiwa berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut pada tahun 2015. Garut Kota sebagaimana pusat kota lainnya merupakan sentra dari beragam aktivitas kemasyarakatan, baik sebagai tempat bermukim, pemerintahan, perekonomian, perpolitikan, keagamaan, maupun kebudayaan. Beragam cara yang dilakukan masyarakat Garut Kota untuk bertahan hidup di tengah gempuran persaingan dan perkembangan zaman, menyempitnya lapangan pekerjaan, serta bertransformasinya sumber daya terampil menjadi mesin. Keanekaragaman yang ada menjadi potret heterogen perkotaan, termasuk dalam hal mencari nafkah yang di antaranya tercermin melalui fenomena Pedagang Kaki Lima (PKL) di Garut Kota sebagai salah satu sumber mata pencaharian masyarakat Kabupaten Garut.

Keberadaan PKL di Garut Kota bukanlah tanpa sebab, maraknya PKL yang menjajakan dagangannya seiring sejalan dengan perkembangan populasi manusia perkotaan yang kian meningkat tanpa diimbangi dengan ketersediaan

lapangan pekerjaan maupun sumber mata pencaharian lainnya. Keberadannya tak lepas dari sejarah panjang perjalanan Kabupaten Garut semenjak masa kolonial hingga sekarang. Seiring berjalannya waktu, PKL Garut Kota berkembang pesat hingga menimbulkan kepadatan di zona merah (delapan titik), yaitu: 1) Jalan Jend. A. Yani; 2) Jalan Mandalagiri; 3) Jalan Pasar Baru; 4) Jalan Ciwalen; 5) Jalan Siliwangi; 6) Jalan Kiansantang; 7) Jalan Cikuray; dan 8) Jalan Ciledug.

Adapun jumlah PKL Garut Kota yang tercatat di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar (Disperindagpas) Kabupaten Garut tahun 2015 sebanyak 1.318 pedagang. Keberadaan PKL Garut Kota seakan menjadi dilema bagi Pemerintah Daerah (Pemda) Garut. Maraknya PKL yang memadati jantung kota, di satu sisi memberi dampak positif berupa tergerakannya roda perekonomian masyarakat, baik dalam skala kecil maupun menengah, namun di sisi lain maraknya PKL yang berjualan di pinggir jalan menimbulkan persoalan yang pelik dan menjadi salah satu prioritas penanganan, karena kesemrawutan PKL berimbas pada pudarnya nilai estetik perkotaan, menyempitnya bahu dan badan jalan, serta mencerminkan wilayah

kumuh perkotaan. Pemda Garut berupaya mencari solusi yang tepat dalam upaya pengayoman, penertiban, dan pembinaan para PKL, salah satunya adalah dengan relokasi PKL ke beberapa lokasi dan gedung yang telah disediakan.

Kesemrawutan Garut Kota yang disebabkan oleh para PKL merupakan persoalan klasik. Ketidaktersediaan tempat bagi para pedagang untuk menjajakan dagangannya merupakan salah satu sebab para PKL berjualan di zona tersebut. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima di daerah telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan maka diperlukan penataan pedagang kaki lima, maka Pemerintah Kabupaten Garut menuangkannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2015 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan. Konkretnya, melalui Kepbup Garut Nomor 511.23/Kep. 790-Admrek/2014, upaya penataan pun ditempuh oleh Pemda Garut sebagai langkah membenahi pusat kota, sehingga dapat memberikan kenyamanan baik bagi pribumi maupun para wisatawan.

Adapun dalam pelaksanaannya, diberlakukan Pemantauan (*Monitoring*) Kebijakan yang dilaksanakan oleh Bupati/Walikota dan sekurang-kurangnya dilakukan dua kali dalam setahun sebagaimana termaktub dalam Pasal 45 ayat 1 dan 2 Permendagri No. 41 Tahun 2012. Pemantauan Kebijakan tersebut

kemudian dijawatahkan kepada Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Garut. Pemantauan diperlukan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran, menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi risiko yang lebih besar, serta melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila hasil Pemantauan mengharuskan untuk itu. Pemantauan memiliki andil yang besar dalam keberlangsungan suatu kebijakan, sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan dapat sesuai dengan koridor tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Bukan perkara mudah bagi Pemda Garut untuk menertibkan PKL Garut Kota, membutuhkan suatu pendekatan yang holistik, komprehensif, serta berwawasan ekologis, sehingga dapat menciptakan suatu kebijakan yang menguntungkan bagi semua pihak. Berdasarkan fenomena-fenomena yang Penulis temukan di lapangan, Penulis merumuskan indikasi masalah ke dalam beberapa poin sebagai berikut: 1) Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Garut belum memiliki pedoman baku mengenai petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) terkait dengan Pemantauan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Garut Kota; 2) Perlakuan Pemda Garut yang kurang memenuhi asas keadilan maupun kesamaan dalam merelokasi para PKL, cenderung tidak adil dalam membuat keputusan, dan inkonsisten terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah dibuatnya sendiri. Banyaknya PKL yang direlokasi tidak diimbangi dengan ketersediaan gedung. Hal ini berdampak pada masih adanya sebagian PKL yang dipindahkan ke zona kuning yang notabene lebih dekat ke pusat perbelanjaan maupun trotoar sebagai

akses pejalan kaki, sehingga para PKL yang telah menempati gedung pun merasa perlakuan Pemda Garut kurang memenuhi asas keadilan dan kesamaan. Permasalahan ini kemudian memicu timbulnya ekses lain, yaitu para PKL yang telah menempati gedung kemudian kembali berjualan di tempat semula; 3) Kurangnya promosi yang digalakkan oleh Pemda Garut mengakibatkan para PKL yang telah menempati kavling gedung menjadi enggan menempatnya dan lebih memilih untuk kembali berdagang di tempat semula. Gedung PKL pun menjadi sepi dari para pedagang, sehingga minat konsumen menurun secara drastis untuk berbelanja di gedung tersebut. Bagi para PKL yang masih tetap bertahan, posisi semacam ini malah tidak menguntungkan, melainkan mencekik mata pencaharian para PKL. Gedung pun menjadi terbengkalai dan hanya sesekali dibuka; dan 4) Upaya relokasi tidak dibarengi dengan sarana dan prasarana yang memadai bagi para PKL. Lokasi gedung kurang strategis, Gedung PKL 1 dan 2 berjarak ± 1 km pusat perbelanjaan (Pengkolan Garut), sehingga apabila berjalan kaki mesti ditempuh cukup jauh dengan karakter relief menanjak, hal ini mengurangi minat masyarakat yang ingin berbelanja untuk mengakses lokasi gedung tersebut. Adanya keinginan yang kuat dari Pemda Garut untuk membenahi para PKL yang berjualan di pusat keramaian kota tidak diimbangi dengan ketersediaan gedung yang mencukupi, dari sekitar 876 pedagang yang direlokasi, hanya 467 di antaranya yang mendapatkan kavling di gedung PKL 1 dan 2. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sisanya ditempatkan di tempat relokasi sementara yang notabene secara kondisi tidak berbeda jauh dengan tempat semula mereka berjualan. Hal ini tentu dapat memantik kecemburuan sosial antar pedagang, yang mana masih terdapat sebagian pedagang yang direlokasi ke tempat lain dalam kondisi semula dengan tenda dan gerobak, ataupun emperan di

pinggir jalan, tidak seperti para pedagang yang mendapat jatah relokasi di Gedung PKL 1 dan 2 yang memiliki fasilitas lapak dagangan, air bersih, dan listrik tanpa dipungut biaya apapun, walaupun ada sebagian pedagang yang membangun lapaknya dengan biaya sendiri. Ditambah lagi dengan tempat relokasi sementara di beberapa titik (Zona Kuning) seperti Jalan Pasar Baru dari Perempatan Gunung Payung s/d Perempatan Guntur, Perempatan A. Yani Mandalagiri s/d Perempatan Guntur, dan Depan Halaman *Islamic Center* eks. Kantor Perdagangan di Jalan Pramuka, yang belum tentu strategis bagi para pedagang.

METODE PENELITIAN

Guna memahami mengapa Pemantauan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Garut Kota oleh Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Garut tidak berdampak kuratif, maka Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai metodenya. Penulis menganggap bahwa metode penelitian kualitatif relevan sebagai dasar metode dalam penelitian ini, karena fenomena yang terjadi tidak memungkinkan diukur secara tepat (dikuantifikasi), sehingga guna mendapatkan pemahaman yang tepat diperlukan eksplorasi kepada para partisipan. Melalui metode penelitian kualitatif ini, Penulis dapat mengkaji perspektif partisipan yang memiliki otoritas, data, informasi, maupun keterkaitan mengenai Pemantauan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Garut Kota oleh Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Garut. Perspektif partisipan dikaji dengan tujuan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari perspektif partisipan terkait. Adapun dalam mengembangkan dan menggambarkan penelitian, Penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif.

Penelitian dengan pendekatan deskriptif ini dilakukan guna mengetahui nilai variabel mandiri dengan memerhatikan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa berdasarkan data atau fakta yang sedang berlangsung, yang kemudian disusun dan dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat menggambarkan suatu masalah yang sedang terjadi. Pendekatan penelitian deskriptif pun meliputi penjelasan mengenai data yang dikumpulkan, sehingga dapat menjelaskan kompleksitas suatu permasalahan. Data diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan berupa observasi non-partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik triangulasi sumber dijadikan sebagai pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini, kemudian data-data tersebut direduksi, disajikan, dan ditarik simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang Penulis lakukan menunjukkan bahwa: 1) Pemantauan (*Monitoring*) memang rutin dilakukan oleh Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak mengacu pada petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis), dengan alasan tidak terdapat Juklak dan Juknis yang mengatur tentang pelaksanaan Pemantauan; 2) Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima tidak mendasarkan *monitoring* pada indikator-indikator tertentu, sehingga dalam pelaksanaannya hanya mendasarkan pada apa yang ditemukan di lapangan; dan 3) Walaupun tidak ada Juklak dan Juknis mengenai Pemantauan, bukan berarti tidak ada dokumen yang terkait dengan Pemantauan. Dokumen tersebut berupa Nota Dinas yang isinya merupakan hasil Pemantauan di lapangan, kemudian isi dari Nota Dinas tersebut disampaikan pada *briefing-briefing* Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam lingkup Pemantauan Kebijakan ini, antara lain: 1) *Monitoring* pelaksanaan kebijakan oleh pihak-pihak terkait untuk mengukur seberapa tercapai kebijakan ini dalam pelaksanaannya; 2) Membuka ruang dialog serta sosialisasi lanjutan kepada para Pedagang Kaki Lima; 3) Memberikan bantuan berupa gerobak dagang gratis kepada para Pedagang Kaki Lima yang bersedia berjualan di Jalan Pasar Baru (zona kuning); 4) Melakukan promosi-promosi berupa penyebaran kupon diskon bagi para konsumen, pameran-pameran, serta perayaan hari istimewa; dan 5) Melakukan penindakan/penertiban bagi pelanggar, dalam bentuk razia secara berkala dan operasi yustisi (sidang di tempat).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah Penulis paparkan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Pemantauan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Garut Kota oleh Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Garut tidak efektif, karena Pemantauan Kebijakan hanya dimaknai secara harfiah, dalam menghasilkan informasi pun tidak melakukan elaborasi yang mendalam, seperti pada aspek Kepatuhan, Pemeriksaan, Akuntansi, dan/atau Eksplanasi.

Dampak dari Pemantauan Kebijakan yang hanya dimaknai secara harfiah adalah pada pelaksanaannya belum memiliki pedoman yang baku, sehingga tidak dapat diidentifikasi penyebab dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan, informasi yang dihasilkan dari proses Pemantauan Kebijakan pun cenderung menjadi terbatas dan dangkal. Hal ini berimplikasi terhadap langkah lanjutan yang semestinya ditempuh oleh Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, upaya koreksi

pelaksanaan kebijakan menjadi tidak tepat guna dan hasil guna dikarenakan informasi yang dihasilkan dari Pemantauan Kebijakan tidak begitu menyokong, hal inilah yang membuat Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima belum dapat dilaksanakan dengan baik sesuai koridor tujuannya.

Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima memang telah melakukan upaya Pemantauan Kebijakan, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 45 ayat 1 dan 2 Permendagri No. 41 Tahun 2012. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya belum memiliki pedoman yang baku, sehingga informasi yang dihasilkan pun hanya mengandalkan dari apa yang terlihat di lapangan, bukan dengan penelitian yang mengkaji lebih dalam dari berbagai sudut pandang, seperti dari Aspek Kepatuhan, Pemeriksaan, Akuntansi, dan Eksplanasi. Berdasarkan hasil penelitian Penulis, walaupun Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam Pemantauannya tidak berpedoman atau tidak mengelompokkan hasil Pemantauannya ke dalam berbagai aspek tersebut, tetapi sedikitnya data yang Penulis peroleh dapat dikelompokkan ke dalam Aspek Kepatuhan dan Pemeriksaan, adapun untuk aspek lainnya Penulis tidak memperoleh data pendukung yang dapat diklasifikasikan ke dalam aspek Akuntansi maupun Eksplanasi dikarenakan Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima tidak melakukan analisis sejauh itu berdasarkan dokumen-dokumen yang diperoleh maupun dari hasil wawancara.

Adapun saran yang Penulis rekomendasikan agar ke depannya hasil dari pelaksanaan Pemantauan Kebijakan oleh Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dapat lebih efektif yaitu dengan merumuskan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) sebagai pedoman dalam melakukan Pemantauan Kebijakan. Penulis menyarankan dalam penyusunan

Juklak dan Juknis ini melibatkan pula unsur akademisi maupun Badan Pusat Statistik, sehingga dalam pembahasannya dapat lebih komprehensif karena terdiri dari berbagai macam sudut pandang, dengan harapan dapat tercipta Juklak dan Juknis yang handal, tepat guna, dan hasil guna. Adapun substansi yang mesti tercantum dalam Juklak dan Juknis ini ialah sebagai berikut.

1. Diperlukan kejelasan *timeline* pelaksanaan Pemantauan Kebijakan, sehingga hasil Pemantauan Kebijakan dari waktu ke waktu dapat terpantau dengan baik perbedaannya;
2. Pelaksanaan Pemantauan Kebijakan ini bukan saja oleh Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, melainkan diperlukan keterlibatan dari para Akademisi maupun Badan Pusat Statistik, sehingga hasilnya pun dapat lebih akurat dan mendalam;
3. Diperlukan kejelasan aspek yang berfungsi sebagai pedoman/ acuan dalam melakukan Pemantauan Kebijakan, seperti aspek Kepatuhan, Pemeriksaan, Akuntansi, dan Eksplanasi;
4. Diperlukan kejelasan dalam pendekatan Pemantauan Kebijakan, baik itu menggunakan Akuntansi Sistem Sosial, Eksperimentasi Sosial, Pemeriksaan Sosial, ataupun Sintesis riset-praktik. Pendekatan-pendekatan ini berguna sebagai cara untuk memantau keluaran dan dampak kebijakan. Pendekatan yang dirasa paling koheren dengan kondisi di lapangan kemudian kemudian dipilih, diperdalam skema pelaksanaannya, dan disesuaikan teknik pemantauannya, sehingga didapatkan pola yang baku dalam pelaksanaan Pemantauan Kebijakan ini;
5. Hasil dari Pemantauan Kebijakan ini bukan dibuat Nota Dinas semata, melainkan berupa Dokumen Hasil Pemantauan Kebijakan, sehingga dapat lebih terstruktur, terukur, dan teratur, hasilnya pun lebih memadai

- sebagai bahan koreksi kebijakan dan dapat dijadikan sebagai referensi di kemudian hari apabila dibutuhkan; dan
6. Dokumen Pemantauan Kebijakan bukan hanya dijadikan sebagai bahan *briefing* di internal Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima saja, melainkan juga didiskusikan dengan akademisi, sehingga temuan-temuan tersebut dapat dicarikan jalan keluar (solusi) yang lebih komprehensif dan efektif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, mulai dari awal hingga akhir penyusunan Skripsi ini, akan dirasa sangat sulit bagi Penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, Penulis memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkenan membantu Penulis dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus, S. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara.
- Bungin, B. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Dror, Y. 1971. *Ventures in Policy Science*. New York, USA: Elsevier.
- Dunn, W. N. 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Terj.)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Faisal, S. 1990. *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*. Malang: Yayasan Asah Asih Asuh (YA3) Malang.
- Kent, G. 1971. *Policy Analysis for Action Recommendations*. USA: ARPA.
- Moelong, L. J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. 1988. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Patton, C. V., & Sawicki, D. S. (1993). *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*. New Jersey, USA: Prentice Hall.
- Raiffa, H. 1968. *Decision Analysis*.
- Spradley, J. 1980. *Participant Observation*. California: Holt, Rinehart and Winston.
- Subarsono, A. 2015. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Dilepangkapi dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, S. A. 2012. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Widodo, J. 2013. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Wiersma, W. 1986. *Research Methods in Education, an Introduction* (Vol. 4th Edition). Boston: Allyn and Bacon.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Azasi Manusia.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun
2006 tentang Jalan.

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun
2012 tentang Koordinasi Penataan
dan Pemberdayaan Pedagang Kaki
Lima.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
41 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penataan dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Daerah Kabupaten Garut
Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2014-2019.

Peraturan Daerah Kabupaten Garut
Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Ketertiban, Kebersihan, dan
Keindahan.

Keputusan Bupati Garut Nomor
511.23/Kep. 790-Admrek/2014
tentang Tim Penataan dan
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
di Kabupaten Garut.

Keputusan Bupati Garut Nomor
511.3/Kep. 201-Satpol PP/2015
tentang Pembentukan Tim
Pengamanan Penertiban Pedagang
Kaki Lima di Wilayah Kabupaten
Garut.

Surat Himbauan Nomor 300/ 173-Satpol
PP/ 2016.

Jurnal

Ericson, R. F. 1970. The Policy Analysis
Role of the Contemporary
University. *Policy Sciences*, I(4).

Mayer, I. S., Daalen, C. E., dan Bots, P.
W. 2004. Perspectives on policy
analyses: a framework for
understanding and design.
*International Journal Technology
Policy and Management*.

Mualim, K. 2008. Analisis Kebijakan
Penataan Pedagang Kaki Lima
(PKL) di Simpang Lima Kabupaten
Pati. *Jurnal Ilmu Administrasi dan
Kebijakan Publik (JIAKP)
Universitas Diponegoro*, V(1).

Rahmawati, V. K., dan Patta, J. 2015.
Penataan PKL di Kota Surakarta:
Mengapa Bisa Berhasil ? *Jurnal
Perencanaan Wilayah dan Kota A
SAPPK Institut Teknologi Bandung*,
IV(2).

Media Online

FOKUSJabar.Com. (2016, September
15). *Ratusan Massa MPKLG
Kembali Datangi Gedung DPRD
Garut*. Diambil kembali dari
fokusjabar.com:
<http://fokusjabar.com/2016/09/15/ratusan-massa-mpklg-kembali-datangi-gedung-dprd-garut/>

GarutExpress1. (2016, September 19).
*Akhirnya Bupati "Ngéléhan," PKL
Diizinkan Kembali Berdagang di
Kawasan Pengkolan*. Diambil
kembali dari Garut Express:
<http://garut-express.com/akhirnya-bupati-ngelehan-pkl-diizinkan-kembali-berdagang-di-kawasan-pengkolan/>

GarutExpress1. (2016, Agustus 04).
*Gedung PKL Intan Medina di Garut,
Jadi Sarang Tempat Maksiat*.

Diambil kembali dari Garut Express:
<http://garut-express.com/gedung-pkl-intan-medina-garut-jadi-sarang-tempat-maksiat/>

Pemda Garut. (2015, Desember 21).
Pemkot Tegal Belajar Penataan PKL di Garut. Diambil kembali dari garutkab.go.id:
<http://garutkab.go.id/pub/news/detail/12095-pemkot-tegal-belajar-penataan-pkl-di-garut.html>

Poros Garut. (2016, Agustus 20). *Gedung PKL Garut Jadi Mubazir dan Nyaris Kumuh*. Diambil kembali dari PorosGarut.com:
<https://www.porosgarut.com/gedung-pkl-garut-jadi-mubazir-dan-nyaris-kumuh/>

Sumber Dokumentasi Lainnya

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar (Disperindagpas) Kabupaten Garut.

Kantor Kecamatan Garut Kota.

Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) Digital Image Library.

**EFEKTIVITAS PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA DI
KABUPATEN CIAMIS (STUDI PADA OBJEK WISATA SITU LENGKONG)**

***TOURISM DESTINATION DEVELOPMENT PROGRAM EFFECTIVENESS IN
CIAMIS DISTRICT (A STUDY OF SITU LENGKONG ATTRACTIONS)***

Nina Marlina; Heru Nurasa; Ramadhan Pancasilawan
ninamarlina854@gmail.com; heru.nurasa@unpad.ac.id;
ramadhan.pancasilawan@unpad.ac.id
Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran
Bandung, Indonesia

ABSTRAK

Skripsi ini berupaya menyajikan hasil penelitian yang menggambarkan bagaimana Efektivitas Program Pengembangan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Ciamis (Studi Pada Objek Wisata Situ Lengkong). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis dari sektor pariwisata setelah Pangandaran memisahkan diri menjadi Daerah Otonomi Baru. Dengan begitu maka Pemerintah Kabupaten Ciamis memfokuskan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata di Situ Lengkong sebagai objek wisata yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan dari tahun 2014-2015. Setelah pelaksanaan program ternyata jumlah PAD yang dihasilkan pada tahun 2015 hanya mencapai 35,99 % dari yang ditargetkan. Temuan tersebut merupakan suatu masalah dari pelaksanaan program tersebut yang disebabkan karena tidak efektifnya program tersebut. Teori yang digunakan yakni teori Efektivitas Program dari Kettner, Moroney dan Martin (2008), beliau mengemukakan bahwa untuk menilai efektivitas program dapat diukur dari Upaya, Efisiensi Biaya, Hasil, Efektivitas Biaya, dan Dampak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif serta pendekatan kualitatif. Data diperoleh dengan melalui studi kepustakaan serta studi lapangan yang berupa observasi non-partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Pengujian kredibilitas data menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik, kemudian data-data tersebut direduksi, disajikan, dan ditarik simpulan. Berdasarkan hasil penelitian, nyatanya pelaksanaan program tersebut belum efektif dalam mencapai tujuannya yakni capaian PAD sesuai target. Belum efektifnya program disebabkan oleh adanya keterbatasan upaya-upaya dan anggaran dalam mengembangkan Situ Lengkong sesuai kebutuhan lapangan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Ciamis.

Kata Kunci: Efektivitas Program, Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, Situ Lengkong, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis.

ABSTRACT

This paper seeks to present the results of research that describes how the Tourism Destination Development Program Effectiveness in Ciamis (A Study of Situ Lengkong Attractions). This research is based on the fact of declined in local revenue (PAD) Ciamis District of the tourism sector after the Pangandaran separates into New Autonomous Region. However, the Government of Ciamis district development program focusing on the tourism destination attraction Situ Lengkong as the most visited by tourists from the years 2014-2015. After the implementation of the program turned out to be the amount of revenue generated in 2015 reached only 35.99% of the target. The findings indicate the

ineffectiveness of the program. The theory used is the effectiveness theory of the program by Kettner, Moroney and Martin (2008), he argued that in order to assess the effectiveness of the program can be measured by Effort, Cost Efficiency, Results, Cost Effectiveness, and Impact. This research is conducted by using descriptive and qualitative approach. Data obtained through literature and field studies in the form of non-participatory observation, indepth interview, and documentation. Testing the credibility of the data using triangulation of sources and triangulation techniques, then the data is reduced, presented, and the conclusions were drawn. Based on the results of research, in fact, the implementation of the program has not been effective in achieving its objectives of local revenue target. The ineffectiveness of the program due to the limitations of efforts and budgets in developing Situ Lengkong according to the needs in the field by the Department of Tourism and Creative Economy Ciamis District.

Keywords: *Effectiveness Program, Tourism Destination Development Program, Situ Lengkong, Local Rrevenue (PAD) Ciamis District.*

PENDAHULUAN

Kabupaten Ciamis merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Jawa Barat. Sebagai salah satu KSPP di Jawa Barat maka Kabupaten Ciamis memiliki pendapatan asli daerah yang cukup besar dari sektor pariwisata. Namun sejak Pangandaran memisahkan diri menjadi daerah otonomi baru Tahun 2013, maka Kabupaten Ciamis kehilangan cukup banyak PAD. Maka dari itu sejak tahun 2014, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis berusaha memfokuskan program pengembangan destinasi pariwisata untuk mengembangkan objek wisata yang salah satunya adalah Situ Lengkong sebagai salah satu objek wisata yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan dari tahun 2014 sampai 2015. Program tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Ciamis sebagaimana tertera dalam Rencana Strategis Tahun 2014-2019.

METODE PENELITIAN

Untuk memahami mengapa Program Pengembangan Destinasi Pariwisata di Situ Lengkong belum efektif maka Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Peneliti menganggap bahwa metode penelitian kualitatif relevan digunakan sebagai metode dalam

penelitian ini. Hal tersebut diarenakan fenomena yang terjadi tidak memungkinkan diukur secara tepat (dikuantifikasi), sehingga untuk mendapatkan pemahaman yang tepat diperlukan eksplorasi kepada para informan. Melalui metode penelitian kualitatif ini, Peneliti dapat mengkaji perspektif informan yang memiliki otoritas, data, informasi, serta keterkaitan lainnya dalam program pengembangan destinasi pariwisata di Situ Lengkong. Pengkajian perspektif informan bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari perspektifnya. Selain itu juga dapat mengetahui permasalahan dari efektivitas program pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Ciamis oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Ciamis dengan melihat fenomena yang ada melalui data-data yang diperoleh agar dapat dideskripsikan secara menyeluruh, terperinci dan akurat sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Kemudian kemudian disusun dan dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat menggambarkan suatu masalah yang sedang terjadi. Pendekatan penelitian deskriptif pun meliputi penjelasan mengenai data yang dikumpulkan, sehingga dapat menjelaskan kompleksitas suatu permasalahan. Data diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi

lapangan berupa observasi non-partisipatif, wawancara mendalam, serta dokumentasi. Teknik pengujian kredibilitas data menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik, kemudian data-data tersebut direduksi, disajikan, dan ditarik simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang Penulis lakukan menunjukkan bahwa: 1) Program pengembangan destinasi pariwisata di Situ Lengkong telah dilaksanakan melalui 3 kegiatan didalamnya yaitu peningkatan pengembangan sarana dan prasarana, pemeliharaan fasilitas objek wisata sertamonitoring dan evaluasi. Namun pelaksanaan semua kegiatan tersebut terkendala oleh anggaran dan sumberdaya manusia dalam pelaksanaannya; 2) Pelaksanaan program ditinjau dari upaya nampaknya upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mencapai tujuan dinas pada program ini belum berjalan sebagaimana kebutuhan lapangan; 3) Dari aspek efisiensi biaya, nyatanya peluang dengan keberadaan UPT Wilayah Panjalu belum mampu memberikan nilai bantu guna menefisienkan biaya dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi sehingga indikator capaian kegiatan monitoring dan evaluasi tidak tercapai secara maksimal; 4) Dari aspek hasil pun 3 kegiatan memang sudah terlaksana namun belum dapat menghasilkan capaian tujuan program; 5) Dari aspek Efektivitas biaya, biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan ini memang cukup besar tetapi hal tersebut tidak berbanding lurus dengan capaian tujuan yang masih sangat jauh dari target yang ditetapkan; 6) Dari aspek dampak, nampaknya keberadaan pariwisata Situ Lengkong memang memberikan dampak yang positif pada pemasukan PAD bagi pemerintah daerah Kabupaten Ciamis serta dapat membangkitkan gairah usaha masyarakat sekitar Panjalu. Namun bagi pemerintah daerah dan masyarakat

sendiri, dampak yang ditimbulkan masih belum cukup memberikan kontribusi yang lebih besar. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian PAD sebesar Rp. 330.588.750 yang hanya berkontribusi sebesar 0,20% dari total PAD Kabupaten Ciamis pada Tahun 2015. Begitupun juga dengan masyarakat, sampai tahun 2015 mayoritas pekerjaan masyarakat Panjalu masih pada sektor pertanian sehingga keberadaan pariwisata Situ Lengkong belum mampu mendongkrak gairah usaha masyarakat secara lebih besar.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah Penulis paparkan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Program Pengembangan Destinasi Pariwisata di Situ Lengkong oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Ciamis belum efektif, karena tujuan program tidak dapat tercapai dilihat dari 5 aspek yaitu upaya, efisiensi biaya, hasil, efektivitas biaya serta dampak. Penyebab ketidakefektifan program tersebut yakni karena adanya keterbatasan anggaran dan sumberdaya manusia dalam pelaksanaannya.

Adapun saran yang Penulis rekomendasikan agar ke depannya program pengembangan destinasi pariwisata dapat berjalan lebih efektif yakni mencari alternatif pembiayaan lain baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kerjasama dengan swasta untuk mengembangkan Situ Lengkong. Kedua yakni melakukan pengkajian karakteristik budaya sekitar Situ Lengkong sebagai dasar pertimbangan dalam pengembangan wisata Situ Lengkong. Serta merangkul masyarakat sekitar yang memanfaatkan usaha pariwisata di Situ Lengkong untuk memasarkan produk khas Ciamis secara komprehensif agar masyarakat lebih mengali potensi usahanya baik kuliner atau merchandise wisata. Dengan begitu masyarakat akan lebih terpacu gairah usahanya serta akan dapat menjadi sarana

promosi agar Kabupaten Ciamis lebih dikenal masyarakat luar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan serta bimbingan dan arahan dari berbagai pihak dari tahap awal hingga akhir penyusunan Skripsi ini, tentu akan dirasa sangat sulit bagi Peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, Peneliti menghaturkan terima kasih sebesar-besarnya serta penghormatan setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah berkenan membantu Peneliti dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Djafar, Suaib. 2013. *Kebijakan Pengembangan Pariwisata Pulau Togian Kabupaten Tojo Una Una Provinsi Sulawesi Tengah*. Bandung: LP3AN Fisip Unpad

Handyaningrat, Soewarno. 1985. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV Haji Masagung.

Jones, Charles O. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerjemah Nashir Budiman: CV Rajawali

Kunardjo, 2002. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. UI Press, Jakarta

Kraft, Michael E dan Scott R Furlong. 2010. *Public Policy: Politics, Analysis and Alternative*. Washington DC: CQ Press.

Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Matland, Richard E. 1995. *Synthezing the Implementation Literature: The*

Ambiguity-Conflict Model of Policy Implementation. Oxford University Press

Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.

Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media

Peter M, Kettner, Robert M Moroney dan Lawrence L. Martin. 2008. *Designing and Managing Programs: An Effectiveness-Bassed Approach*. United States of America: Sage Publications, Inc

Rusli, Budiman. 2013. *Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Bandung: Hakim Publishing.

Siagian, Sondang P. 2001. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Silalahi, Ulbert. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Unpar Press.

Sugiyono. 2009. *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Truen RTH.

Tchjan H. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung-Puslit KP2W Lemlit Bandung.

Thoha, Miftah. 2005. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*: Jakarta: PT Raja Grafindo.

Tjokroaminoto, Bintoro. 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.

Dokumen Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Peraturan Daerah provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 2025

Sumber Dokumentasi

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis 2014-2019
Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis Tahun 2014
Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis Tahun 2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Ciamis Tahun 2014

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Ciamis Tahun 2015

Sumber Lain

Rahmaini, Yulia. 2014. Implementasi Program Pengembangan Destinasi Pariwisata di Kampung Wisata Pasir Kunci Kelurahan Pasirjati Kecamatan Ujung Berung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Skripsi Administrasi Publik. Universitas Padjadjaran.

Richardo Nego, Gerry. 2016. Efektivitas Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Di Kota Bandung. Skripsi Administrasi Publik. Universitas Padjadjaran.

Subagyo, Ahmad Wito. 2000. Efektivitas Program Penanggulangan Masyarakat Perdesaan. Tesis Universitas Gadjah Mada.

Sumber Online

Website Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2012. Diambil kembali dari jabarprov.go.id:
<http://www.jabarprov.go.id/root/dalamangka/dda2012.pdf>.

Republika.co.id. (2015, Mei 17).

Website BPS Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2014. Diambil kembali dari jabarbps.go.id:
http://jabar.bps.go.id/new/website/pdf_publicasi/Jawa-Barat-DalamAngka-2014.pdf

Website Pusdalibang Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2015. Diambil kembali dari pusdalibang.jabarprov.go.id:
<http://pusdalibang.jabarprov.go.id/pusdalibang/berkas/jabar DalamAngka/54Jawa-Barat-Dalam-Angka-2015.pdf>

Website Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2015. Diambil kembali dari disparbud.jabarprov.go.id:
<http://www.disparbud.jabarprov.go.id/applications/fronted/index.php?mod=statistik-wisatawan>

Website Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2016.

Diambil kembali dari
pusdalisbang.jabarprov.go.id:
<http://pusdalisbang.jabarprov.go.id/pusdalisbang/berkas/jabardalamangka747Provinsi-Jawa-Barat-Dalam-Angka-2016.pdf>

**IMPLEMENTASI PROGRAM SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN (STUDI
PADA MADRASAH ALIYAH NEGERI CIPARAY KABUPATEN BANDUNG)**

***THE IMPLEMENTATION OF TEACHER CERTIFICATION PROGRAM (STUDIES
IN MADRASAH ALIYAH NEGERI CIPARAY DISTRICT BANDUNG)***

Ningrum Fauziah Yusuf; Herijanto Bakti; Dedi Sukarno

ningrumfy@gmail.com; herijanto.bakti@unpad.ac.id; dedi.sukarno@unpad.ac.id

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran
Bandung, Indonesia

ABSTRAK

Menyadari akan pentingnya peranan pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas guru melaksanakan sebuah program sertifikasi guru. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana proses implementasi program sertifikasi guru untuk guru madrasah yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Bandung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi program menurut Charles O. Jones yang menyebutkan tiga aktivitas dasar yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program sertifikasi guru dalam jabatan khususnya pada guru Madrasah Aliyah Negeri Ciparay yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Bandung pada pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Dilihat dari organisasi masih kurangnya sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang tersedia. Dari aspek interpretasi, para pelaksana program sudah memahami tujuan dan pedoman program akan tetapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masih belum konsisten. Dalam aspek aplikasi, ditemukan pengawasan pada pelaksanaan program tidak berjalan, terlihat pada belum adanya laporan evaluasi untuk pelaksanaan program sertifikasi guru dalam jabatan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

Kata Kunci: Implementasi Program, Sertifikasi Guru, Profesionalisme Guru

ABSTRACT

Recognizing the importance of the role of education in improving the quality of human resources, the government seeks to improve the quality of teachers to implement a teacher certification program. The purpose of this study was to find out how the process of implementation of the teacher certification program for madrasah teachers conducted by Kementerian Agama District Bandung. The theory used in this research is the theory of program implementation by Charles O. Jones who cites three basic activities, namely the organization, interpretation, and application. The method used is descriptive qualitative determination techniques informants using technique. purposive sampling. The results showed that the implementation of certification of teachers, especially teachers of Madrasah Aliyah Negeri Ciparay conducted by Kementerian Agama District Bandung not optimal because there are still some obstacles encountered. Judging from organizations still lack the human resources and financial resources available. From the aspect of interpretation, all program managers have understood the objectives and guidelines for the program but in the implementation of tasks and functions are still not consistent. In the

aspect of the application, found the supervision of the implementation of the program is not running, is seen in the absence of an evaluation report on the implementation of in-service teacher certification program that has been implemented in previous years

Keywords: *Implementation Program, Teacher Certification, Teacher Professionalism*

PENDAHULUAN

Kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan dari pembangunan pendidikan saat ini masih menunjukkan bahwa daya saing bangsa Indonesia di dunia Internasional masih relatif rendah. Menurut hasil laporan penelitian *United Nation Development Programme* (UNDP) pada tahun 2015 tentang Indeks Pembangunan Manusia menyatakan Indonesia berada pada peringkat ke-110 dari 187 negara dengan nilai IPM mencapai 0,684.

Menyadari akan pentingnya peranan pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas guru dengan mengeluarkan sebuah kebijakan tentang Sertifikasi Guru dan Dosen. Karena salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia adalah komponen mutu guru.

Program sertifikasi guru merupakan rangkaian kegiatan pelaksanaan keputusan pemerintah pusat yang diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendidikan, maka keberhasilan program sangat tergantung pada pemahaman, kesadaran, keterlibatan dan upaya sungguh-sungguh dari segenap aktor pelaksana program. Program sertifikasi guru ini merupakan proses yang berkelanjutan, monitoring dan evaluasi pun harus terus dilakukan secara berkala terhadap guru yang telah mendapatkan sertifikat untuk memantau kinerja guru setelah mendapatkan sertifikat pendidik. Program sertifikasi guru, bagi peneliti adalah sesuatu hal yang menarik untuk diteliti karena merupakan bagian penting dari peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia melalui peningkatan mutu dan

kesejahteraan guru, khususnya di Kabupaten Bandung.

Program sertifikasi guru dalam jabatan ini lahir berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yang mengamanatkan, di mana guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik.

Madrasah Aliyah Negeri yang merupakan salah satu lembaga pendidikan formal pada jenjang menengah dibawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Bandung, yang diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi.

Berdasarkan survei awal yang telah peneliti lakukan di Madrasah Aliyah Negeri Ciparay Kabupaten Bandung diperoleh hasil bahwa ternyata kualitas proses pembelajaran yang dilakukan guru didalam kelas belum berjalan secara optimal atau belum memperlihatkan peningkatan secara signifikan padahal para guru tersebut sudah sertifikasi. Berikut data jumlah guru dan guru yang menerima sertifikasi di MAN Ciparay Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Guru Penerima Tunjangan Profesional atau Dana Sertifikasi Pada Madrasah Aliyah Negeri Ciparay Kabupaten Bandung Tahun 2016

Madrasah Aliyah Negeri Ciparay Kabupaten Bandung	
Jumlah Guru PNS	42
Jumlah Guru Non-PNS	13
Jumlah Guru Penerima Sertifikasi atau TPG	41
Jumlah Siswa	597

(Sumber: *MAN Ciparay, 2016*)

Dapat kita lihat dari tabel 1.1 bahwa 75% dari guru yang mengajar di Madrasah Aliyah Negeri Ciparay Kabupaten Bandung sudah mempunyai sertifikat pendidik atau dengan kata lain guru tersebut sudah sertifikasi. Sudah menjadi sebuah kewajiban para guru yang sudah mempunyai sertifikat pendidik bisa menjadi tenaga profesional.

Banyaknya jumlah guru yang menerima sertifikasi di Madrasah Aliyah Negeri Ciparay Kabupaten Bandung menjadi daya tarik bagi penulis. Dengan banyaknya jumlah guru yang menerima sertifikasi di Madrasah Aliyah Negeri Ciparay Kabupaten Bandung maka sudah seharusnya mutu pendidikan dan profesionalitas guru dalam hal mengajar menjadi semakin membaik.

Mengingat karakteristik dan kondisi guru Madrasah serta struktur organisasi dan kelembagaan Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melakukan adaptasi terhadap pedoman sertifikasi guru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya.

Tujuan program sertifikasi guru akan tercapai dengan baik jika pelaksana maupun peserta dapat memahami dan mengerti maksud dari program ini serta mereka mempunyai kemampuan untuk melakukan tugas-tugas guna mencapai tujuan tersebut. Selain pemahaman akan tujuan, kemampuan guru dalam

melaksanakan tugas-tugasnya dalam proses belajar mengajar merupakan poin penting yang harus selalu ditingkatkan.

Berdasarkan hasil observasi awal penulis menemukan beberapa indikasi masalah terkait pelaksanaan program sertifikasi guru, hal tersebut gambarkan sebagai berikut: 1) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung tidak melakukan penataan ulang terhadap sumber daya manusia yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung untuk mendukung berjalannya implementasi program secara efektif; 2) Masih terdapat ketidakpahaman para sasaran program akan proses pelaksanaan program sertifikasi guru dalam jabatan. Kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh para pelaksana program kepada sasaran program yaitu para guru mengenai prosedur program sertifikasi guru mengakibatkan terhambatnya proses pelaksanaan dikarenakan banyak guru yang tidak memahami persyaratan yang dibutuhkan untuk sertifikasi; 3) Para pelaksana program sertifikasi guru ini tidak menjalankan apa yang telah ditetapkan dalam *Standard Operational Procedure* (SOP) program sertifikasi guru dalam jabatan, yaitu mengenai kegiatan monitoring, evaluasi, dan laporan.

Berdasarkan pemaparan masalah diatas, maka penulis tertarik melakukan sebuah penelitian mengenai "Implementasi Program Sertifikasi Guru Dalam Jabatan (Studi Pada Madrasah Aliyah Negeri Ciparay Kabupaten Bandung)".

METODE

Guna memahami bagaimana implementasi program sertifikasi guru oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung maka Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai metodenya. Penulis menganggap bahwa metode penelitian kualitatif relevan sebagai dasar metode dalam penelitian ini, Penulis menganggap bahwa metode penelitian kualitatif relevan

sebagai dasar metode dalam penelitian ini, karena fenomena yang terjadi tidak memungkinkan diukur secara tepat, sehingga guna mendapatkan pemahaman yang tepat diperlukan eksplorasi kepada para partisipan. Melalui metode penelitian kualitatif ini, penulis dapat mengkaji perspektif partisipan yang memiliki otoritas, data, informasi, maupun penjelasan mengenai pelaksanaan program sertifikasi guru dalam jabatan. Adapun dalam mengembangkan dan menggambarkan penelitian, Penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Data diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan berupa observasi non-partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik triangulasi sumber dijadikan sebagai pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini, kemudian data-data tersebut direduksi, disajikan, dan ditarik simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa: 1) Dalam aspek organisasi, hubungan kerja antar pelaksana program sertifikasi guru dalam jabatan untuk guru madrasah di Kabupaten Bandung sudah baik. Bentuk kerja sama antar instansi maupun lembaga dan alur komunikasi antara LPTK, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung, dan kepala sekolah Madrasah Aliyah Negeri Ciparay sebagai penyampai informasi kepada guru yang berperan sebagai sasaran program (peserta sertifikasi) dilakukan dengan cara sosialisasi dan koordinasi mengenai pelaksanaan program sertifikasi guru.

Selanjutnya untuk ketersediaan sumber daya. Sumber daya merupakan aspek penting dalam pelaksanaan suatu program, hal ini karena keberadaan sumber daya dapat mempengaruhi keberhasilan suatu program. Agar dapat dilaksanakan dengan baik, kesiapan sumberdaya pelaksana program adalah hal penting untuk diperhatikan. Sumber

daya yang diperlukan dalam menjalankan suatu program terdiri dari beberapa macam yaitu: sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya sarana dan prasarana. dalam hal kuantitas sumber daya manusia untuk pelaksanaan program sertifikasi guru madrasah di Kabupaten Bandung masih kurang untuk beberapa kegiatan khususnya untuk perekapan data dan juga proses pengawasan yang meliputi kegiatan monitoring, evaluasi dan pembuatan laporan. Sedangkan kualitas sumber daya manusia untuk kompetensi dalam melaksanakan program dari pemberian wewenang dan tanggungjawab sudah cukup baik dilihat dari kegiatan program yang sampai saat ini masih terlaksanakan. Jika dilihat dari segi sumber daya anggaran untuk pelaksanaan program sertifikasi guru dalam jabatan untuk guru madrasah masih kurang dan hal ini menjadi kendala dalam implementasi program sertifikasi guru dalam jabatan pada guru madrasah di Kabupaten Bandung. Dan yang terakhir dilihat dari segi sumber daya sarana dan prasarana, berdasarkan hasil observasi peneliti melihat kurangnya sarana untuk kegiatan verifikasi dan pemberkasan meskipun para implementor mengatakan sudah memenuhi tapi melihat kondisi dilapangan tidak adanya ruang arsip untuk berkas, tidak adanya laptop yang disediakan dimana para implementor masih harus menggunakan barang pribadinya untuk mendukung pelaksanaan program sertifikasi guru dalam jabatan untuk guru Madrasah di Kabupaten Bandung ini.

Dalam melaksanakan program, sebagai pedoman dan panduan bagi pelaksana program maka perlu adanya aturan hukum dan Standard Operating Procedure (SOP) yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. Dengan adanya panduan yang memuat tata cara dan mekanisme dalam pelaksanaan kegiatan dari pada program, dan jika hal

tersebut dilaksanakan sesuai aturannya maka tujuan yang telah ditetapkan bisa tercapai. Implementasi program memerlukan perintah atasan yang jelas dan tegas, dan perlu memberikan sanksi bagi aparat yang melanggar, sebagaimana yang dikemukakan oleh Jones bahwa pemimpin diperlukan untuk memberikan perintah dan mempertanggungjawabkan kewajiban-kewajiban tersebut dan kemudian dibagikan dalam cara yang tetap serta dibatasi secara ketat oleh aturan-aturan yang berhubungan dengan cara-cara paksaan dan sejenisnya, yang akan dikenakan sanksi berupa pemecatan atau pembuangan bagi para pejabat yang melakukannya.

2) Aspek Interpretasi, yang dimaksudkan oleh Jones dalam implementasi program adalah menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Bagaimana suatu program dapat dilaksanakan juga tergantung pada pemahaman dari para pelaksana atau implementor dalam mengartikan hal-hal yang berhubungan dengan satu kegiatan atau program, baik mengartikan maksud dan tujuan dari program tersebut. Kurangnya pemahaman para peserta yaitu guru dalam proses pelaksanaan program sertifikasi guru ini menimbulkan banyak kendala saat pelaksanaan itu berlangsung. Kenyataan ini menunjukkan bahwa guru yang sudah membaca buku pedoman sertifikasi guru saja belum sepenuhnya memahami isinya meskipun mereka akan mengikuti sertifikasi itu sendiri. Permasalahan seperti sebenarnya dapat diatasi dengan adanya komunikasi interaktif antara guru dan pelaksana yang memahami program sertifikasi guru dengan baik. Dan aspek yang terakhir adalah 3) Aspek Aplikasi, para pelaksana program diarahkan untuk melaksanakan program sesuai dengan pedoman dan aturan yang sudah ditetapkan, tapi pada kenyataannya masih saja ditemukan adanya pedoman pelaksanaan program

yang tidak dilaksanakan. Aktivitas aplikasi merupakan tahap akhir dalam tahapan implementasi program, dimana penerapan merupakan ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program. Penerapan untuk program sertifikasi guru dalam jabatan dapat melalui: a) Penyelenggaraan Program Sertifikasi Guru; b) Sosialisasi Program Sertifikasi Guru; c) Ketercapaian Tujuan dan Manfaat Program Sertifikasi Guru; dan d) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti mengenai Implementasi Program Sertifikasi Guru Dalam Jabatan (Studi Pada Madrasah Aliyah Negeri Ciparay Kabupaten Bandung), peneliti memperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan program sertifikasi guru pada guru madrasah yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupate Bandung belum berjalan secara optimal. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan program sertifikasi guru masih belum memenuhi beberapa aspek implementasi program yang dikemukakan oleh Charles O. Jones yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi yang belum berjalan sebagaimana mestinya dimana masih terdapat beberapa permasalahan dan hambatan.

1. Aspek organisasi, pada aspek ini masih ditemukan beberapa kendala dan permasalahan yang terjadi seperti kurangnya sumber daya, baik dari sdm, finansial, maupun sarana dan prasarana. Selain itu komunikasi yang terjalin dalam hubungan kerja antar pelaksana penyelenggara program sertifikasi guru dalam jabatan untuk guru madrasah di Kabupaten Bandung dalam hal komunikasi atau penyampaian pesan masih belum optimal kepada sasaran program serta masih kurang jelas.

2. Pada aspek interpretasi, penulis menemukan bahwa pemahaman dari para pelaksana program sertifikasi guru dalam jabatan untuk guru Madrasah di Kabupaten Bandung terhadap program sertifikasi guru dalam jabatan sudah cukup memahami akan tujuan dan panduan program. Akan tetapi para pelaksana belum konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal tersebut dikarenakan belum semua panduan yang telah ditetapkan berjalan sesuai yang diharapkan seperti belum optimalnya dalam melakukan sosialisasi sehingga pelaksanaan program sertifikasi guru dalam jabatan sehingga berpengaruh kepada pemahaman dari para peserta atau sasaran program (*target group*) pemahaman dari sasaran program juga turut menjadi kunci pelaksanaan program tidak mencapai tujuan.
3. Pada aspek aplikasi, dalam pelaksanaannya program sertifikasi guru dalam jabatan ini sudah berpedoman pada panduan yang ada. Akan tetapi tidak berjalan sesuai dengan panduan seperti sosialisasi. Selain itu, dalam hal pengawasan, evaluasi, dan pembuatan laporan juga masih belum dilaksanakan.

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis mencoba memberikan beberapa saran yang mungkin dapat menjadi masukan bagi semua pihak yang tergabung dalam pelaksanaan program sertifikasi guru dalam jabatan untuk guru madrasah di Kabupaten Bandung. Adapun saran-saran yang akan penulis kemukakan antara lain sebagai berikut:

1. Pentingnya peran petugas dalam pelaksanaan program sertifikasi guru dalam jabatan untuk guru madrasah di Kabupaten Bandung seharusnya diimbangi dengan pemenuhan jumlah sumber dayanya. Maka dari itu perlu untuk memerhatikan jumlah staf atau pegawai yang dibutuhkan untuk

melaksanakan segala kegiatan yang berhubungan dengan implementasi program sertifikasi guru serta sumber daya finansialnya.

2. Sosialisasi merupakan hal yang penting agar program sertifikasi guru dalam jabatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan harapan. Maka dari itu seharusnya kegiatan sosialisasi ini lebih ditingkatkan lagi agar pelaksanaan program sertifikasi guru ini berjalan sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan sehingga baik para pelaksana maupun peserta dapat melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dengan baik.
3. Dalam melaksanakan suatu program, kegiatan pengawasan dan pembuatan laporan sangat dibutuhkan untuk nantinya dapat digunakan sebagai patokan atau acuan dan sebagai bahan evaluasi. Untuk itu seharusnya dalam memberikan laporan pelaksanaan program harus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan agar dapat melihat perkembangan dari program sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan dan tindakan selanjutnya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, mulai dari awal hingga akhir penyusunan Skripsi ini, akan dirasa sangat sulit bagi Penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, Penulis memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkenan membantu Penulis dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Creswell, W. Jhon. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Dunn, William N. 2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press
- Jones. Charles O. 1994. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta Utara: PT. Raja Grafindo Persada
- Miles, Mathew B. And A. Michael Huberman. 1994. *Qualitative Data Analysis*. California: SAGE Publications
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda
- Mulyasa. E. 2009. *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*.
- Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Muslich. Masnur. 2007. *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nugroho. Riant. 2011. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Robbins, Stephen P., & Judge, Timothy A. (2008). *Perilaku Organisasi*. (Ed. 12). (Diana Angelica, Penerjemah). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sarimaya. Farida. 2008. *Sertifikasi Guru (Apa. Mengapa. dan Bagaimana)*. Bandung: Yrama Widya
- Subarsono. AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Teori. Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM (Teori. Dimensi Pengukuran. dan Implementasi dalam Organisasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 1999. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: CV Alfabeta
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif. kualitatif. dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan, Dr. H, M.Si. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI
- Wahab. Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wibawa, Samudra, dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Dokumen-dokumen**
- Buku 1 Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2016
- Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang RI No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Tentang Standar Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008. Tentang Guru
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 tahun 2011 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam jabatan
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2013

Tentang Sertifikasi Guru Dalam
Jabatan Dalam Rangka Penataan
Dan Pemerataan Guru

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi
Bagi Guru Raudlatul Athfal Dan
Madrasah Dalam Jabatan Tahun
2015

Hasil Penelitian

Alzano. Alfi. 2015. *Efektivitas Program
Sertifikasi Guru Dalam
Meningkatkan Mutu Hasil
Pendidikan (Studi pada SMK Negeri
2 Batusangkar)*. Skripsi Program
Studi Administrasi
Publik.Bandung.Program Sarjana
Unpad

Nurhafni. 2010. *Implementasi Program
Sertifikasi Guru Dalam Peningkatan
Mutu Pendidikan (Studi Kasus di
Kabupaten Aceh Utara)*.Jurnal JKAP
Volume 15 No 1

Nurhayati. Mira. 2008. *Pengaruh
Implementasi Kebijakan Sertifikasi
Guru Terhadap Kinerja Guru SD
Negeri di Kecamatan Antapani pada
Dinas Pendidikan Kota Bandung*.
Skripsi Program Studi Ilmu
Administrasi Negara. Surakarta.
Program Sarjana Universitas Sebelas
Maret

**RESPONSIVENESS PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN PENCEMARAN
LIMBAH INDUSTRI PADA LAHAN PERTANIAN DI KAWASAN RANCAEKEK**

***RESPONSIVENESS OF INDUSTRIAL WASTE POLLUTION MITIGATION AND
RECOVERY ON AGRICULTURAL LAND IN RANCAEKEK***

Rizki Nugraha; Budiman Rusli; MD. Enjat M

rizkinugraha2293@gmail.com; budiman.rusli@unpad.ac.id; mdenjatm@unpad.ac.id

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran
Bandung, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena transformasi struktural dari pertanian ke industri, tanpa dibarengi dengan orientasi terhadap lingkungan hidup, sehingga terjadi pencemaran lingkungan akibat limbah industri terjadi pada lahan pertanian di Kawasan Rancaekek sejak 1991. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori responsiveness dari Ansoff (1990) dan McDonnell yang diuraikan lebih lanjut oleh Popescu (2014). Metode penelitian kualitatif dipakai oleh penulis untuk mengetahui secara mendalam mengapa responsiveness penanggulangan dan pemulihan pencemaran limbah industri pada lahan pertanian di Kawasan Rancaekek kurang baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responsiveness Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi (BPLHD) Jawa Barat, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Bandung, dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sumedang dalam penanggulangan dan pemulihan lahan tercemar kurang baik karena masih adanya pengaruh dari lingkungan Badan, belum adanya pedoman yang disepakati antar Badan, dan secara kapasitas belum memadai. Berdasar hal tersebut seharusnya ketiga Badan membuat SOP dan desain solusi yang disepakati bersama, menata ulang data dan laporan terkait permasalahan, dan melibatkan masyarakat dalam penyelesaian masalah yang ada.

Kata Kunci: Responsiveness, Penanggulangan dan Pemulihan, Pencemaran, Limbah industri.

ABSTRACT

This research is motivated by the phenomenon of structural transformation from agriculture to industry, without accompanied the orientation to the environment, so that happened environment pollution caused by industrial waste occurs on agricultural land in Rancaekek since 1991. The theory used in this research is the theory of responsiveness from Ansoff and McDonnell (1990) that elaborated more by Popescu (2014). Qualitative research methods used by the writer to understand in depth why the mitigation and recovery of industrial waste pollution on agricultural land responsiveness in Rancaekek is less good.

The research results showed that the responsiveness of The Local Environmental Management Agency Of West Java Province (BPLHD), The Environmental Control Agency Of Bandung Regency (BPLH), and The Environment Agency Of Sumedang Regency (BLH) in mitigation and recovery of contaminated land is less good because it is still the influence from the environment of Agency, the absence of guidelines that agreed between the Agency and the capacity is not yet adequate. Based on the case, the three agencies supposed to

create SOP and solution design a mutually agreed, rearranging the data and reports related to the problem, and involve the community in solving problems.

Keywords: *Responsiveness, Mitigation and Recovery, Pollution, Industrial Waste.*

PENDAHULUAN

Fenomena transformasi struktural dari pertanian ke industri, membuat banyak lahan pertanian, Ruang Terbuka Hijau (RTH) terkonversi menjadi lahan industri. Kondisi seperti ini menyebabkan munculnya eksternalitas, baik positif maupun negatif. Eksternalitas positif yang paling dirasakan berkaitan dengan lapangan kerja. Namun adanya sisi positif itu tidak dibarengi dengan orientasi terhadap lingkungan hidup, sehingga eksternalitas negatif yang paling dirasakan yakni persoalan limbah menjadi ancaman yang tidak hanya untuk saat ini, tapi dapat pula menjadi masalah yang lebih serius lagi di masa yang akan datang. Disinilah diperlukan peran dari pemerintah untuk mengurus dan merespon eksternalitas yang ada, terlebih jika eksternalitas negatif berupa limbah sudah lintas wilayah administratif.

Otonomi daerah membuat pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menjalankan roda pemerintahannya, memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri. Kenyataannya otonomi daerah disikapi beragam. Kabupaten atau kota cenderung memproteksi seluruh potensinya demi kepentingannya sendiri, dan menutup diri terhadap kabupaten atau kota lain. Dampak negatif kegiatan ekonomi di suatu daerah pada daerah lain, seperti *externalities*, juga tidak dihiraukan lagi (Keban, 2009).

Adanya eksternalitas negatif, seperti limbah industri, dari suatu daerah pada daerah lain tentu memerlukan *responsiveness* pemerintah daerah yang saling berkaitan agar dampak negatif tersebut dapat dikendalikan sesuai dengan regulasi yang ada. Namun faktanya eksternalitas negatif sangat sulit dikendalikan, terlebih jika sudah lintas administratif. Hal ini terjadi di Kawasan

Rancaekek, pencemaran terjadi dengan wilayah terdampak pencemaran berada di Kabupaten Bandung, sedangkan sumber pencemarnya adalah pelaku usaha yang masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Sumedang

Pencemaran limbah dan kerusakan lingkungan di Rancaekek sudah terjadi lebih dari 20 tahun lamanya, tepatnya mulai dari tahun 1991, khususnya di 4 (empat) desa, yang masuk dalam administratif Kabupaten Bandung, yakni Desa Jelengong, Linggar, Bojongloa dan Sukamulya. Menurut Greenpace.org (2015) dan BPS Kabupatn Bandung (2015) tercatat kurang lebih 93 industri yang berdiri di Wilayah Rancaekek. Industri-industri yang ada menghasilkan limbah cair dengan total lebih dari 959 litek/detik atau 7,31 ton/hari.

Dari puluhan perusahaan di Kawasan Rancaekek justru perusahaan yang berada di administratif Kabupaten Sumedang yang dianggap menjadi penyumbang limbah terbanyak, terutama PT. Kahatex II, yang menyumbang debit limbah cair sebanyak 21.108 meter kubik perhari, ditambah PT. Five Star setidaknya 600 meter kubik pehari, dan PT. Insan Sandang mencapai 1500 meter kubik perhari, maka total ketiga perusahaan tersebut menyumbang debit limbah sebanyak 33,74% dari debit total 65.618 – 85.618 meter kubik perharinya. (BPLHD Jawa Barat, 2015; BPLH Kabupaten Bandung, 2015; BLH Kabupaten Sumedang, 2015; dan Greenpeace, 2015).

Banyaknya limbah cair yang dibuang oleh perusahaan-perusahaan yang ada tidak sebanding dengan daya tampung dan debit air dari sungai yang dijadikan tempat dibuangnya limbah yakni Sungai Cikijing, bagian hulu di Kabupaten Sumedang dan bagian hilir di Kabupaten Bandung, oleh perusahaan-perusahaan

yang masuk ke Kabupaten Sumedang. Menurut Kepala UPTB Laboratorium Lingkungan Hidup BLH Kabupaten Sumedang, daya tampung sungai Cikijing, untuk PT. Kahatex II yang setidaknya dalam satu hari menghasilkan debit limbah cair setidaknya 19.000 meter kubik perharinya pun sudah dapat dikatakan tidak layak.

Berlarutnya permasalahan dapat dilihat dari lahan pertanian yang tercemar semakin meluas dari 415 Ha menjadi 752 Ha (BPLHD Jawa Barat, 2015; KLHK, 2015). Berbagai upaya memang telah dilakukan sebagai bentuk respon pemerintah daerah dari mulai pengawasan hingga kesepakatan untuk penyelesaian di luar pengadilan berupa pemulihan atas lahan tercemar namun tidak menuai hasil signifikan, tidak ada kebijakan yang kemudian menjadi solusi.

Diperlukan *responsiveness* dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung dan Pemerintah Kabupaten Sumedang, secara teknis dilakukan oleh badan teknis di bidang lingkungan hidup, yakni oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Bandung, dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sumedang.

Selama kurun waktu lebih dari 20 tahun, tidak ada peningkatan kualitas atau perbaikan atas wilayah yang terkena limbah, yakni lahan pertanian, malah semakin memburuk. BPLHD Provinsi Jawa Barat, BPLH Kabupaten Bandung, dan BLH Kabupaten Sumedang seolah tidak menunjukan *responsiveness* yang diharapkan sehingga penanggulangan dan pemulihan pencemaran limbah industri pada lahan pertanian di kawasan Rancaekek tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Setelah mempelajari fenomena diatas dan melakukan wawancara serta observasi awal, peneliti menemukan beberapa indikasi masalah BPLHD

Provinsi Jawa Barat, BPLH Kabupaten Bandung, dan BLH Kabupaten Sumedang dalam penanggulangan dan pemulihan pencemaran limbah industri pada lahan pertanian di kawasan Rancaekek sebagai berikut:

1. Pencemaran di kawasan Rancaekek sejak tahun 1991, namun hingga 2016, air sungai yang merupakan sumber irigasi tetap hitam pekat dan menimbulkan bau busuk, lahan pertanian yang tetap tak produktif, lahan pertanian yang tercemar justru semakin meluas dengan trend meningkat dari tahun ke tahun.
2. Letak kawasan Rancaekek yang masuk dalam dua wilayah administratif menjadi masalah tersendiri. Terdapat perbedaan persepsi dari aspek regulasi dan aspek aparatur. Hal ini memicu perbedaan sudut pandang antar aparat Badan. Kondisi ini menunjukkan adanya ego sektoral antar pemerintah daerah Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, dan Provinsi Jawa Barat, sehingga penanggulangan dan pemulihan pencemaran limbah industri pada lahan pertanian di kawasan Rancaekek berjalan lamban.
3. Kurang harmonisnya komunikasi antar Badan. Informasi yang ada di antar Badan, hanya dimiliki Badan tersebut saja, tidak ada alur informasi antar Badan, dan hanya beberapa anggota Badan saja yang mengetahui pencemaran di Kawasan Rancaekek ini.

TINJAUAN TEORITIS

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *responsiveness* dari Igor Ansoff dan E. McDonnell (1990) yang dijabarkan lebih lanjut dalam Popescu (2014) karena terdapat relevansi dengan permasalahan yang diteliti. Permasalahan pencemaran limbah industri di Kawasan Rancaekek tidak semata berkaitan dengan kebijakan yang ada, namun berkaitan pula dengan isu-isu yang ada, baik di lingkungan masyarakat

maupun pemerintah, dalam merespon permasalahan tersebut, dan hal demikian relevan dengan teori yang diangkat oleh Popescu (2014) yang memandang *responsiveness* dapat dikaji aspek (1) *climate (will to respond)*, (2) *competence (ability to respond)* and (3) *capacity (volume of response)*.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini digunakan oleh penulis karena penulis ingin mengetahui secara mendalam mengapa *responsiveness* penanggulangan dan pemulihan pencemaran limbah industri pada lahan pertanian di Kawasan Rancaekek belum sesuai harapan, dengan menggunakan faktor-faktor penentu *responsiveness*, padahal permasalahannya telah berlangsung hingga lebih dari dua puluh tahun lamanya. Hal ini sesuai dengan pendapat Maxwell (1996) bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berusaha memahami suatu makna (*understanding the meaning*) dalam sebuah studi mengenai peristiwa, situasi, dan perilaku serta persepektif yang terlibat di dalamnya hingga pengaruh yang ada.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi observasi, wawancara. Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling*. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Climate (Will to Respond)*

Dalam konteks penelitian ini, *climate* mengarah pada bagaimana suasana dan pengaruh lingkungan bagi pemerintah dalam merespon permasalahan dengan cara tertentu dan bagaimana cara meresponnya, berkenaan dengan *Will to Respond* dari Badan, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor.

1.1 *Power*

Penulis menjabarkan subaspek *power* ke dalam bahasan regulasi, kebijakan yang dibuat, dan power serta pengaruh dari sisi nonpemerintah. Dari segi aturan, sedikitnya dalam UU 32/2009, PP 101/2014, Perda Jawa Barat 1/2012 telah diatur bahwa penanggulangan dan pemulihan lahan atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, mengenai kewenangan, hingga dana jaminan.

Berdasar hasil penelitian, pemerintah pada dasarnya memiliki *power* untuk melakukan penanggulangan dan pemulihan pencemaran limbah industri di Kawasan Rancaekek.. Namun Pemertintah Daerah terkait belum mampu memanifestasikannya, adanya faktor lemahnya regulasi menurut aparat, sisi dilematis yang harus dihadapi, serta daya yang dimiliki perusahaan membuat *responsiveness* penanggulangan dan pemulihan pencemaran limbah industri pada lahan pertanian di Kawasan Rancaekek tidak sebagaimana mestinya.

1.2 *Structure*

Dalam konteks penelitian ini, subaspek *structure* mengarah pada bagaimana hubungan atau kolektivitas dari susunan (unit/bidang) Badan, dan unit/bidang yang menjadi representasi Badan. Berdasar wawancara didapat hasil bahwa di masing-masing Badan terdapat bidang yang memang menjadi representasi Badan, namun kurangnya kolektivitas pada tiga Badan tentu memberi pengaruh atas lambannya respon terhadap masalah penanggulangan dan pemulihan pencemaran limbah industri di Kawasan Rancaekek.

1.3 *Culture*

Dalam membahas subaspek *culture* penulis mengaitkannya dengan bagaimana pola dan kebiasaan Badan dalam menentukan jadwal inspeksi dan bagaimana Badan berhubungan dengan

masyarakat dan pelaku usaha. Merujuk pada hasil wawancara dan pengamatan penulis, kebiasaan dan pola badan dalam merespon permasalahan limbah di Kawasan Rancaekek sangat normatif, menunggu hingga terjadi hal kasuistik, dan minim dalam melibatkan masyarakat.

1.4 *Mentality*

Dari keterangan informan, penulis berpandangan bahwa, terdapat ego sektoral yang cukup kentara. Terdapat *missing link* antara BLH Kabupaten Sumedang dan BPLH Kabupaten Bandung bahkan BPLHD Jawa Barat, namun tidak ada pembahasan atau tindak lanjut yang menghasilkan titik temu, karena tetap saling mempertahankan kepentingan sektoral mereka. Berdasar hasil penelitian didapat bahwa memang masih terdapat ego sektoral dan saling lempar tanggungjawab, sikap pasif, serta menurunnya semangat dalam penanggulangan dan pemulihan pencemaran pada lahan pertanian di Kawasan Rancaekek ini, sehingga membuat penyelesaian masalah sulit menemukan solusi dan kesatuan tindakan.

2. *Competence (Ability To Respond)*

Aspek *competence* mengarah pada kemampuan organisasi untuk merespon, bagaimana organisasi menyiapkan sistem, dan tentu di tentukan oleh berbagai subaspek.

2.1 *Knowledge*

Dengan mengetahui perkembangan masalah yang ada, maka dapat ditentukan dengan segera tindakan yang harus dilakukan. Pengetahuan mengenai permasalahan yang ada akan berhubungan dengan laporan dan data mengenai permasalahan tersebut. Berdasar keterangan informan dan observasi penulis, tidak banyak aparat yang mengetahui terkait permasalahan dan data-data terkait permasalahan sangat minim, sehingga merupakan hal yang wajar apabila seringkali menimbulkan

perbedaan persepsi antar Badan dan tak memunculkan solusi baru dalam penanggulangan dan pemulihan lahan di Kawasan Rancaekek.

2.2 *Talent dan Skill*

Salah satu kendala yang dihadapi dalam permasalahan pencemaran limbah industri di suatu kawasan adalah munculnya anggapan kuat limbah yang terbuang bukan hanya limbah industri, namun terdapat limbah domestik seperti limbah rumah tangga. Inilah yang penulis bahas dalam subaspek *talent* dan *skill*.

Berdasar keterangan informan dan observasi penulis, sulitnya mengklasifikasi antara limbah industri dan limbah domestik bukan karena aparat tidak mampu membedakannya karena memang dapat diukur dan dapat ditentukan sesuai hitungan parameter dan baku mutu. Hal yang membuat masih adanya kegamangan antara limbah industri dan limbah domestik adalah akumulasi dari limbah dibanding dengan daya tampung dan belum terpisahnya IPAL untuk industri dan untuk domestik/gabungan. Kondisi tersebut menghambat respon pemerintah

2.3 *Structure Systems*

Pembahasan subaspek *structure systems* mengarah pada metode, kesepakatan atau standar yang digunakan antar Badan dalam merespon permasalahan. Dengan adanya metode yang jelas dari Badan dalam merespon permasalahan akan memberikan progres dan arah yang jelas. Penelitian penunjukan hasil bahwa Badan memang tetap berpatokan pada regulasi, dari sisi Kabupaten Bandung maupun Kabupaten Sumedang mengharapkan provinsi. Sementara itu provinsi tetap mengharapkan pihak perusahaan-perusahaan pelaku pencemar, padahal pada saat yang bersamaan pun mengetahui bahwa hal tersebut sulit terwujud, namun tidak ada pembahasan

lebih lanjut mengenai penanggulangan dan pemulihan lahan ini.

Lalu Badan pun tidak terlalu konsisten dalam penyelesaian permasalahan penanggulangan dan pemulihan pencemaran limbah industri pada lahan pertanian di Kawasan Rancaekek ini, sehingga *responsiveness* ketiga Badan berjalan begitu saja, tanpa adanya kesepakatan dan tujuan yang diusung secara bersama dan jelas.

2.4 *Share Knowledge*

Dalam penelitian ini pun subaspek *share knowledge* mengarah pada bagaimana komunikasi, alur informasi, penyamaan persepsi antar Badan, hingga tindaklanjut yang dilakukan, yang merupakan hal penting karena permasalahan yang dihadapi.

Berdasar observasi dan wawancara, penulis menemukan bahwa komunikasi dan pertemuan antar Badan dalam membahas penanggulangan dan pemulihan hingga tindaklanjut yang akan dilakukan masih minim. Hal ini pun ditambah dengan tidak semua anggota ketiga Badan mengetahui permasalahan, sehingga sangat bergantung pada segelintir orang saja, dengan saat yang bersamaan permasalahan limbah industri tidak hanya di Kawasan Rancaekek.

3. *Capacity (Volume of Response)*

Kapasitas dalam penelitian ini berbicara bagaimana kemampuan dan apa yang dimiliki oleh personal dan organisasional Badan.

3.1 Kapasitas Personal dan Organisasional

Berdasar wawancara, secara umum mengenai kapasitas SDM aparat Badan tidak menjadi masalah bagi BPLHD Jawa Barat dan BPLH Kabupaten Bandung, bagi BLH Kabupaten Sumedang di beberapa posisi memang tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Kemudian dari segi anggaran, menurut BLH Kabupaten Sumedang, hal tersebut

menjadi salah satu hambatan, selain sarana. Sementara itu BPLHD Jawa Barat menyebutkan meskipun dananya tersedia, tetap saja perusahaanlah yang seharusnya menanggung. Sedangkan BPLH Kabupaten Bandung tidak mempermasalahkan mengenai anggaran.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Responsiveness BPLHD Jawa Barat, BPLH Kabupaten Bandung, dan BLH Kabupaten Sumedang dalam penanggulangan dan pemulihan pencemaran limbah industri pada lahan pertanian di Kawasan Rancaekek kurang baik karena belum sepenuhnya *power* bagi Badan berupa ketentuan perundang-undangan dilaksanakan, masih kurangnya kolektivitas Badan meskipun telah ada bidang yang menjadi representasi Badan, pola penyelesaian yang hanya kasuistik, secara *mentality* masih adanya ego sektoral dari Badan, ditambah adanya pengaruh dari lingkungan yang menjadi sisi dilematis Badan.

Secara kualifikasi aparat Badan sudah baik, namun hanya sedikit aparat yang mengetahui permasalahan, tidak adanya *structure system* yang jelas dalam merespon penanggulangan dan pemulihan lahan tercemar, membuat upaya yang dilakukan lamban. *Share knowledge* yang kurang baik sehingga perbedaan persepsi masih sering terjadi membuat belum ditemukannya solusi pasti.

Sikap Badan yang menunggu itikad baik dari perusahaan yang tidak kunjung dirasakan pun menentukan keputusan yang diambil Badan menjadi lamban. Keterbatasan kapasitas Badan berupa anggaran, sarana dan prasarana serta dirasa kurangnya aparat secara kuantitas dan kualitas membuat *responsiveness* Badan tidak menunjukkan perbaikan yang jelas.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, penulis merumuskan beberapa saran yang dapat meningkatkan

responsiveness BPLHD Jawa Barat, BPLH Kabupaten Bandung, dan BLH Kabupaten Sumedang menjadi lebih efektif. Adapun saran yang penulis berikan sebagai berikut:

1. Membuat mekanisme baku yang disepakati bersama. Dengan dibuat mekanisme atau SOP baku setiap Badan, sebagai representasi pemerintah daerah, akan memahami apa yang harus dilakukan, sehingga terdapat kejelasan progres dalam penanggulangan dan pemulihan pencemaran limbah industri pada lahan pertanian di Kawasan Rancaekek ini.
2. Membuat jadwal pengawasan dan pemantauan bersama. Dengan dibuatnya jadwal pengawasan bersama antar Badan, maka antar Badan mengetahui dengan pasti dan seksama apa yang terjadi di lapangan, terlebih permasalahan limbah industri di Kawasan Rancaekek ini merupakan permasalahan limbah industri lintas kabupaten.
3. Membentuk satgas atau pokja bersama. Dengan dibentuknya satgas atau pokja yang melibatkan ketiga Badan, maka penanggulangan dan pemulihan akan lebih intens karena memang dikoordinasikan oleh satuan yang sengaja dibentuk untuk hal tersebut, sehingga dapat menunjukkan progress yang jelas.
4. Membuat jadwal pertemuan berkala. Dengan adanya pertemuan yang terjadwal, maka komunikasi antar Badan akan lebih efektif, pertukaran informasi, hingga evaluasi dapat lebih intens, hal tersebut pun dapat mereduksi ego sektoral dan ego instansi yang ada.
5. Menata ulang *filing* data dan laporan terkait pengendalian limbah industri di Kawasan Rancakek baik internal Badan maupun antar Badan. Hal ini dimaksudkan agar semua rekam jejak yang dilakukan menjadi bukti sekaligus menjadi acuan bagi tindakan

selanjutnya, dan sebagai bahan penyamaan persepsi.

6. Mengadakan *public hearing*. Dengan mendengar suara masyarakat. Badan, secara luas pemerintah daerah, dapat menyusun kembali prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat. Disaat bersamaan ini dapat menjadi media pendekatan terhadap masyarakat yang nantinya dapat menjadi perpanjangan tangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ansoff, I. dan McDonneell, E. 1990. *Implanting Strategic Management*. Prentice Hall. New York.
- Budiardjo, M. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. PT. Granedia. Jakarta.
- Farazmand, Ali. 2004. *Sound Governance: Policy and Public Administration Innovation*. Praeger Publisher. London..
- Maxwell, J. A. 1996. *Qualitative Research Design: An Interactive Approach*. SAGE Publications, Inc. California.
- Priyarsono. 2011. *Dari Pertanian ke Industri: Analisis Pembangunan dalam Perspektif Ekonomi Regional*. IPB Press. Bogor.
- S, Pamudji. 1981. *Ekologi Administrasi Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance "Kepemerintahan Yang Baik"*. Mandar Maju. Bandung.

Jurnal

- Bryer, T.A. 2009. Explaining Responsiveness in Collaboration: Administrator and Citizen Role Perceptions. *Public Administration Review* 69(2): 271-283.

- Hobolt, S. B dan Klemmenson, R. 2008. Government Responsiveness and Political Competition in Comparative Perspective. *Comparative Political Studies* (41): 309-337
- Nawawi, J. 2012. Membangun Kepercayaan Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 1(3): 19-29.
- Popescu, L. G. 2011. Making Public Policies Work: Between Responsiveness And Convergence Of Agendas. *Transylvanian Review of Administrative Sciences* (34E): 186-200
- _____. 2014. Public governance and strategic responsiveness. *Journal of Public Administration, Finance and Law* 5: 144-156.
- Saltzstein, G. H. 1992. Bureaucratic responsiveness: Conceptual issues and current research. *Journal of Public Administration Research and Theory* 2:63-8.
- Stivers, C. 1994. The listening bureaucrat: responsiveness in public administration. *Public Administration Review* 54(4): 364-369.
- Sutono, S. dan Kurnia, U. 2002. Identifikasi Kerusakan Lahan Sawah Di Rancaekek Kabupaten Bandung, Jawa Barat. *Peneliti Badan Litbang Pertanian Pada Balai Penelitian Tanah, Jl. Tentara Pelajar 12, Cimanggu Bogor hal 283-296.*
- Vigoda, E. 2000. Are You Being Served? The Responsiveness of Public Administration to Citizens Demands: An Empirical Examination in Israel *Public Administration*, 78(1): 165-191.
- _____. 2002. From Responsiveness to Collaboration: Government, Citizens, and The Next Generation of Public Administration. *Public Administration Review* 6(5): 527-540.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. 3 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 *Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*. 17 Oktober 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333. Jakarta.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 *Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029*. 30 November 2010. Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E. Bandung.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2007 Sampai Tahun 2027*. 19 September 2008. Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3. Bandung.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031*. Sumedang.
- Dokumen Instansi Pemerintah**

Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
2015. *Laporan Akhir Penyusunan
Review Feasibility Study IPAL
Terpadu Rancaekek Kabupaten
Bandung*. BPLH Kabupaten
Bandung. Bandung.

Badan Pusat Statistik. 2015. *Statistik
Daerah Kecamatan Rancaekek,
2015*. Otober.

BPS Kabupaten Bandung. Bandung.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 2014.
*Review dan Reorientasi Satu Tahun
Penanganan Multipihak Banjir
Jalan Nasional Rancaekek dan
Penanganan Pencemaran Limbah
Industri pada Lahan Sawah*. Jawa
Barat.

Skripsi, Tesis, Disertasi

Ariva, P. D. 2014. Pengendalian
Pencemaran Limbah Cair Industri
oleh Badan Pengendalian
Lingkungan Hidup (BPLH)
Kabupaten Bandung (Studi:
Kecamatan Rancaekek). *Skripsi*.
Program Studi Administrasi Publik
Universitas Padjadjaran. Sumedang.

Dameria, S. V. 2014. Pengendalian
Pencemaran Air Sungai Di
Kecamatan Majalaya oleh Badan
Pengelola Lingkungan Hidup
(BPLH) Kabupaten Bandung.
Skripsi. Program Studi Administrasi
Publik Universitas Padjadjaran.
Sumedang.

Maruti, S.K. 2013. Responsivitas
Pelayanan Kantor Pertanahan Kota
Salatiga Dalam Implementasi
Program Larasita. *Tesis*. Program
Pascasarjana Program Studi
Magister Administrasi Publik
Universitas Sebelas Maret. Surakarta

Artikel Seminar/symposium/diskusi

de Silva, A. T.T. A Framework
Formeasuring Responsiveness. *Gpe*

Discussion Paper Series: No 32.
Eip/Gpe/Ebd World Health
Organization

Sumber lainnya

Koalisi Melawan Limbah. 2016.

Konsekuensi Tersembunyi: Valuasi
Kerugian Ekonomi Akibat
Pencemaran Industri. April.
Bandung

Sutono, S dan Kurnia, U. 2014.
Identifikasi Kerusakan Lahan Sawah
Rancaekek Kabupaten Bandung,
Jawa Barat. Badan Litbang Pertanian
pada Balai Penelitian Tanah. Bogor.

Dalam Jaringan (internet)

BPLHD Jawa Barat. 2015. Pengantar
Diskusi FGD Bedah Kasus
Pencemaran dan atau Kerusakan
Lingkungan Di Kecamatan
Rancaekek, Kabupaten Bandung:
“Meretas Jalan Panjang Menggapai
Kebenaran dan Keadilan
[http://www.bplhdjabar.go.id/index.p
hp/layanan/k2-categories-2/item/41-
pengantar-diskusi-fgd-bedah-kasus-
pencemaran-dan-atau-kerusakan-
lingkungan](http://www.bplhdjabar.go.id/index.php/layanan/k2-categories-2/item/41-pengantar-diskusi-fgd-bedah-kasus-pencemaran-dan-atau-kerusakan-lingkungan). 9 Januari 2016 (12.40).

Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
2015. Limbah Pabrik Bisa Jadi Bom
Waktu.
[http://dishut.jabarprov.go.id/?mod=
detilBerita&idMenuKiri=&idBerita
= 2194](http://dishut.jabarprov.go.id/?mod=detilBerita&idMenuKiri=&idBerita=2194). 9 Januari 2016 (13.06).

Kementerian Lingkungan Hidup. 2015.
Penegakanhukum Terhadap Kasus
Pencemaran Lahan Pertanian Di
Kecamatan Rancaekek Kabupaten
Bandung.
[http://www.menlh.go.id/penegakan-
hukum-terhadap-kasus-pencemaran-
lahan-pertanian-di-kecamatan-
rancaekek-kabupaten-bandung/](http://www.menlh.go.id/penegakan-hukum-terhadap-kasus-pencemaran-lahan-pertanian-di-kecamatan-rancaekek-kabupaten-bandung/). 9
Januari 2016 (12. 40).

- MI, 2015. Pemrpov Gugat 3 Perusahaan Tekstil.
<http://www.mediaindonesia.com/mipagi/read/10454/Pemprov-Gugat-3-Perusahaan-Tekstil/2015/04/15>. 10 Januari 2016 (19.10)
- Nugraha, I. 2015. Sawah Tercemar Limbah Pabrik, Beginilah Nasib Petani Rancaekek.
<http://www.mongabay.co.id/2015/04/14/sawah-tercemar-limbah-pabrik-beginilah-nasib-petani-rancaekek/>. 9 Januari 2016 (12.16).
- Wawan. 2015. Pencemaran di Rancaekek Menggila, Siapa yang Bermain-main di Sana?.
<http://pribuminews.com/14/04/2015/pencemaran-di-rancaekek-menggila-siapa-yang-bermain-main-di-sana/>. 9 Januari 2016 (14.05)
- Wry. 2015. Akhirnya Menteri Lingkungan Hidup RI Turun Langsung Sidak PT Kahatex.
<http://www.sinarpaginews.com/fullpost/ekonomi/1400069489/akhirnya-menteri-lingkungan-hidup-ri-turun-langsung--sidak-pt-kahatex.html>. 9 Januari 2016 (12.15).
- Wulandari, I. 2015. Pemkab Bandung Rugi Akibat Limbah Industri.
<http://m.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/04/25/nnc966-pemkab-bandung-rugi-akibat-limbah-industri>. 9 Januari 2016 (13.05).
- Yadi, A. M. 2015. Melawan Limbah Memulihkan Sawah - bagian 1.
<http://m.greenpeace.org/seasia/id/high/blog/melawan-limbah-memulihkan-sawah-bagian-1/blog/52421/>. 9 Januari 2016 (13.01).

<http://jurnal.unpad.ac.id/jane/>

JURNAL ADMINISTRASI NEGARA

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran
Bandung, Indonesia